



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

panrb

REFORMASI BIROKRASI
BERDAMPAK untuk
KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PANRB

2024



 www.menpan.go.id

 (+6221) 7398381 - 89

 Jl. Jend. Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB. Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Reformasi Birokrasi Berdampak Untuk Kesejahteraan Rakyat*.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi



Widyantini, S.H, MPM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Mandat dan Peran Strategis	3
C. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Prioritas Nasional Tahun 2024	9
C. Perjanjian Kinerja 2024.....	12
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Capaian Kinerja Lainnya	50
D. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP.....	59
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PANRB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Inspektur Kementerian PANRB



Aan Syaiful Ambia 

NIP. 19670916 198803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024. Kementerian PANRB pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 9 (sembilan) indikator kinerja, dan 13 (tujuh belas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 13 (tiga belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target:

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan 1

Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	70	71,38	101,97	
		Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	432 K/L/D	473 K/L/D	109,49	
		Indeks SPBE Nasional	2,85 (Predikat Baik)	3,12 (Predikat Baik)	109,47	
2	Terwujudnya ASN yang Profesional	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	45,087%	58.42%	129,56	
		Skor <i>Employer Branding</i> ASN	59,65%	13.98%	23,44	
3	Terwujudnya Instansi	Persentase Instansi	K/L	100%	100%	100%
			Prov	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	Kab/ Kota	80%	85,24%	106,55
4	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM		163 IP	192 IP	117.79
5	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional		4,00	4,02	100,50
6	Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"	K/L	100%	100%	100
			Prov	100%	84,2%	84.20
			Kab/ Kota	70%	81,7%	116.71

Kinerja keuangan Kementerian PANRB tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar **Rp401.172.466.950,-** atau 98,32% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu **Rp408.023.563.000,-**, Pagu anggaran yang dapat digunakan tersebut adalah pagu **Rp417.285.288.000,-** setelah dikurangi blokir belanja perjalanan dinas (akun 524xxx) tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 sebesar **Rp9.261.725.000,-**.

Capaian kinerja Kementerian PANRB diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sepanjang tahun 2024 terjadi 2 (dua) kali penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengubah struktur, tugas, dan fungsi Kementerian PANRB, yaitu:

1. Perpres Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan pada 23 Agustus 2024. Perpres ini sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu mempertegas peran Kementerian PANRB dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara; dan

2. Perpres Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan pada 5 November 2025. Perpres ini menambahkan transformasi digital pemerintah menjadi salah satu bidang dalam fungsi Kementerian PANRB, selain reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik

Namun demikian dalam pencapaian kinerjanya sepanjang tahun 2024, karena kedua Perpres tersebut terbit dalam jangka waktu yang berdekatan, Kementerian PANRB menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kementerian PANRB) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditetapkan Struktur Organisasi Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

STAF AHLI

- Staf Ahli terdiri atas:**
1. Bidang Politik dan Hukum;
 2. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 3. Bidang Administrasi Negara; dan
 4. Bidang Budaya Kerja.

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

**BIRO
MANAJEMEN KINERJA DAN
KERJA SAMA**

**BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,
ORANISASI, DAN HUKUM**

**BIRO
DATA, KOMUNIKASI,
DAN INFORMASI PUBLIK**

**BIRO
UMUM DAN KEUANGAN**

**DEPUTI BIDANG
REFORMASI BIROKRASI,
AKUNTABILITAS APARATUR,
DAN PENGAWASAN**

- SEKRETARIAT DEPUTI**
- ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI
 - ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENERAPAN AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
 - ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I
 - ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II
 - ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III

**DEPUTI BIDANG
KELEMBAGAAN
DAN TATA LAKSANA**

- SEKRETARIAT DEPUTI**
- ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
 - ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 - ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH
 - ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN, KEMARITIMAN DAN INVESTASI
 - ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

**DEPUTI BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR**

- SEKRETARIAT DEPUTI**
- ASISTEN DEPUTI PENGUATAN BUDAYA KERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
 - ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN TALENTA DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
 - ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
 - ASISTEN DEPUTI PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN, DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
 - ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

**DEPUTI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK**

- SEKRETARIAT DEPUTI**
- ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN SISTEM DAN STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
 - ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK
 - ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN INKLUSIF
 - ASISTEN DEPUTI PEMERDEAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 - ASISTEN DEPUTI KOORDINASI DAN FASILITASI STRATEGI PENGEMBANGAN PRAKTIK TERBAIK PELAYANAN PUBLIK

B. Mandat dan Peran Strategis

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024, Kementerian PANRB menerima mandat yang sangat strategis, dari 5 (lima) arahan Presiden, terdapat 2 (dua) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, yaitu:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta; dan
- 2) Reformasi birokrasi, yaitu: a) kecepatan melayani dan memberi izin, b) menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; c) adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Arahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Kementerian PANRB dalam mengambil peran strategis, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PANRB 2020-2024 sebagai berikut:

1. Membangun SDM aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit yang fokus kepada sektor-sektor pilihan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter lokal;
2. Mendorong peningkatan peran diaspora dalam pembangunan bangsa dan Negara terutama pada sektor-sektor pilihan misalnya kesehatan dan pendidikan;
3. Membangun kelembagaan yang antisipatif, adaptif, dan produktif;
4. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
5. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien; dan
6. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan nasional dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, pada pelantikan Menteri PANRB pada tanggal 7 September 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan harapan terkait reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang berdampak sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas; serta
3. Birokrasi yang lincah dan cepat.

Dan untuk menjawab arahan dan harapan Presiden tersebut Menteri PANRB menetapkan 7 Program Prioritas Kementerian PANRB, yaitu:

1. Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada jutaan ASN;
2. Penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 (empat) klaster prioritas;
3. Transformasi profesionalisme ASN berbasis digital (meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional) dan penataan tenaga non-ASN (honoror);
4. Akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di seluruh Indonesia;
5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN dan DOB Papua; dan
7. Transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian PANRB.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan Visi Kementerian PANRB adalah: **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia”**, dengan Misi :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik – *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global.
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian PANRB juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing; dan
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Kementerian PANRB pada akhir periode Renstra tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Kementerian PANRB
Periode 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL: 80 Prov: 71 Kab/Kota: 67
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	Skor 62 (Efektif)
	Indeks SPBE Nasional	2,6
	Jumlah K/L/Pemda yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”	371 IP
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN	80
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	71
	Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke Atas	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	500 Unit Kerja
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional.	3,75
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%
Tujuan 2:	Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB	83

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel		
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB	Skor 61 (Efektif)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB	0,9
	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB	80
Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB	85
	Opini BPK	WTP
Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima	Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB	3,75

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah

mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Kementerian PANRB diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 3 (tiga) PN, yaitu:

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas pada RKP 2024 yang terkait dengan Kementerian PANRB

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Proritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya
			Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> , dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Transfomasi Digital	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah
PN 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan penyelenggara pemilu

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Transformasi Manajemen SDM Aparatur	Penguatan budaya kerja dan <i>employee branding</i>
			Percepatan peningkatan kapasitas SDMA
			Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan
			Pengembangan talenta dan karir
			Percepatan transformasi digital manajemen ASN
			Perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur
		Transformasi pelayanan publik	Pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi
			Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
			Penguatan ekosistem inovasi
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif
			Penerapan SPBE Terintegrasi
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi

C. Perjanjian Kinerja 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kementerian PANRB ditandatangani oleh Menteri PANRB pada bulan Maret 2024, dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kementerian tidak pernah dilakukan perubahan (revisi) hingga akhir tahun. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan target kinerja bersifat minor dan ditetapkan dengan mekanisme perubahan target periodik.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.	1	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional.	70
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	432 K/L/D
		3	Indeks SPBE Nasional.	2,85 (Predikat Baik)
2	Terwujudnya ASN yang professional	1	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	45,087%
		2	Skor <i>Employer Branding</i> ASN	59,65%
3	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 80%
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	1	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	163 IP
5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	1	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional.	4,00
6	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	1	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" ke atas)	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 70%

Perjanjian Kinerja inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Anggaran Kementerian PANRB berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Program-Kegiatan	Pagu sebelum blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Pagu setelah blokir belanja 542 (Rp.000,-)
Program Dukungan Manajemen	271.521.582	2.669.750	268.851.832
• Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PANRB	1.080.978	79.900	1.001.078
• Pengelolaan Legislasi dan Litigasi	844.102	115.615	728.487
• Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	14.604.437	728.664	13.875.773
• Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	220.470.403	784.629	219.685.774
• Pengelolaan Sistem dan Teknologi	11.642.690	-	11.642.690
• Pengelolaan Organisasi dan SDM	16.150.204	661.150	15.489.054
• Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	6.728.768	299.792	6.428.976
Program Kebijakan. Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	145.763.706	6.591.975	139.171.731
• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	3.886.486	371.335	3.515.151
• Perumusan Kebijakan PANRB	15.535.161	518.747	15.016.414
• Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	2.002.000	-	2.002.000
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.	27.315.155	927.032	26.388.123

Program-Kegiatan	Pagu sebelum blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Pagu setelah blokir belanja 542 (Rp.000,-)
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan			
• Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	16.017.038	1.065.749	14.951.289
• Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana	9.546.258	562.057	8.984.201
• Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur	43.153.692	846.173	42.307.519
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	28.307.916	2.300.882	26.007.034
Jumlah	417.285.288	9.261.725	408.023.563



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan Visi Kementerian PANRB adalah: **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia”**, dengan Misi :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik – *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global.
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian PANRB juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing; dan
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Kementerian PANRB pada akhir periode Renstra tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Kementerian PANRB
Periode 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL: 80 Prov: 71 Kab/Kota: 67
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	Skor 62 (Efektif)
	Indeks SPBE Nasional	2,6
	Jumlah K/L/Pemda yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”	371 IP
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN	80
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	71
	Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke Atas	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	500 Unit Kerja
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional.	3,75
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Tujuan 2: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel	Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB	83
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB	Skor 61 (Efektif)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB	0,9
	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB	80
Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB	85
	Opini BPK	WTP
Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima	Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB	3,75

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Kementerian PANRB diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 3 (tiga) PN, yaitu:

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas pada RKP 2024 yang terkait dengan Kementerian PANRB

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya
			Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> , dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Transformasi Digital	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah
PN 7: Memperkuat	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas	Penguatan penyelenggara pemilu

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Lembaga Demokrasi	
		Transformasi Manajemen SDM Aparatur	Penguatan budaya kerja dan <i>employee branding</i>
			Percepatan peningkatan kapasitas SDMA
			Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan
			Pengembangan talenta dan karir
			Percepatan transformasi digital manajemen ASN
			Perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur
		Transformasi pelayanan publik	Pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi
			Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
			Penguatan ekosistem inovasi
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif
			Penerapan SPBE Terintegrasi
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi

C. Perjanjian Kinerja 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kementerian PANRB ditandatangani oleh Menteri PANRB pada bulan Maret 2024, dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kementerian tidak pernah dilakukan perubahan (revisi) hingga akhir tahun. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan target kinerja bersifat minor dan ditetapkan dengan mekanisme perubahan target periodik.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.	1	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional.	70
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	432 K/L/D
		3	Indeks SPBE Nasional.	2,85 (Predikat Baik)
2	Terwujudnya ASN yang professional	1	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	45,087%
		2	Skor <i>Employer Branding</i> ASN	59,65%
3	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 80%
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	1	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	163 IP
5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	1	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional.	4,00
6	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	1	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" ke atas)	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 70%

Perjanjian Kinerja inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2024 adalah sebesar **Rp417.285.288.000,-** , namun dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, anggaran perjalanan dinas (akun 524xxx) diblokir sebesar Rp9.261.725.000,- sehingga pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan oleh Kementerian PANRB tahun 2024 adalah sebesar **Rp408.023.563.000,-**, dengan rincian per program dan per kegiatan sebagai berikut:

Program-Kegiatan	Pagu sebelum blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Pagu setelah blokir belanja 542 (Rp.000,-)
Program Dukungan Manajemen	271.521.582	2.669.750	268.851.832
• Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PANRB	1.080.978	79.900	1.001.078
• Pengelolaan Legislasi dan Litigasi	844.102	115.615	728.487
• Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	14.604.437	728.664	13.875.773
• Pengelolaan Keuangan. BMN dan Umum	220.470.403	784.629	219.685.774
• Pengelolaan Sistem dan Teknologi	11.642.690	-	11.642.690
• Pengelolaan Organisasi dan SDM	16.150.204	661.150	15.489.054
• Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	6.728.768	299.792	6.428.976

Program-Kegiatan	Pagu sebelum blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Blokir belanja 542 (Rp.000,-)	Pagu setelah blokir belanja 542 (Rp.000,-)
Program Kebijakan. Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	145.763.706	6.591.975	139.171.731
• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	3.886.486	371.335	3.515.151
• Perumusan Kebijakan PANRB	15.535.161	518.747	15.016.414
• Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	2.002.000	-	2.002.000
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	27.315.155	927.032	26.388.123
• Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	16.017.038	1.065.749	14.951.289
• Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana	9.546.258	562.057	8.984.201
• Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur	43.153.692	846.173	42.307.519
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	28.307.916	2.300.882	26.007.034
Jumlah	417.285.288	9.261.725	408.023.563



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PANRB Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri PANRB merupakan kinerja tahun ke-5 (tahun terakhir) pada periode Renstra Kementerian PANRB 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100,71% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	70	71,38	101,97
2	Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	432 K/L/D	473 K/L/D	109,49
3	Indeks SPBE Nasional	2,85 (Predikat Baik)	3,12 (Predikat Baik)	109,47
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya ASN yang Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	45,087%	58.42%	129,56
2	Skor <i>Employer Branding</i> ASN	59,65%	13.98%	23,44

Sasaran Strategis 3					
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L	100%	100%	100%
		Prov	100%	100%	100%
		Kab/ Kota	80%	85,24%	106,55
Sasaran Strategis 4					
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM		163 IP	192 IP	117.79
Sasaran Strategis 5					
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional		4,00	4,02	100,50
Sasaran Strategis 6					
Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" ke atas")	K/L	100%	100%	100
		Prov	100%	84,2%	84.20
		Kab/ Kota	70%	81,7%	116.71

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 (delapan) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 (tiga) target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	70	71,38	101,97
2.2 Jumlah K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas K/L	432 K/L/D	473 K/L/D	109,49
2.3 Indeks SPBE Nasional	2,85 (Predikat Baik)	3,12 (Predikat Baik)	109,47

1,1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional

Penguatan kelembagaan diwujudkan dengan menghadirkan kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Guna menyoal hal tersebut dilakukan penataan kelembagaan instansi pemerintah, tentu dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamika organisasi masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, penataan kelembagaan juga wajib menyesuaikan arahan Presiden mengenai Penyederhanaan Birokrasi Instansi Pemerintah menjadi 2 level dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Pasca Penyederhanaan Birokrasi.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan penataan organisasi dan tata kerja dan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Kegiatan penataan organisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan harus dilaksanakan secara kontinyu guna menjaga bentuk kelembagaan yang proporsional. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan evaluasi kelembagaan.

Struktur dan proses organisasi merupakan objek utama dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Namun di luar kedua aspek tersebut, aspek lainnya tidak dikesampingkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun proses evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Berdasarkan Pasal 3 PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali dengan hasil akhir berupa skor peringkat komposit.

Skor peringkat komposit menyajikan interpretasi dari hasil total skor dengan 5 (lima) kategori dan merupakan nilai akhir, peringkat organisasi dan interpretasi.

Penghitungan Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Nasional dihitung dengan cara merata-rata skor peringkat komposit Instansi Pemerintah dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023. Cara penghitungan ini dilakukan sesuai dengan mandat dalam pasal 3 ayat 3 Permen.PANRB nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, bahwa evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Tahapan mendapatkan nilai akhir dari evaluasi kelembagaan itu sendiri melewati beberapa proses yakni evaluasi mandiri yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, lalu diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, dan apabila terdapat hal-hal perlu diklarifikasi (misalnya adanya perbedaan angka yang terlalu signifikan atas hasil evaluasi mandiri dan hasil verifikasi) lalu dilakukan validasi hasil evaluasi guna mendapatkan angka valid.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut disampaikan kepada Menteri PANRB untuk dilakukan verifikasi hasil evaluasi oleh Tim Verifikasi Kementerian PANRB. Metode yang digunakan dalam kegiatan Evaluasi Kelembagaan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
2. Melakukan pengumpulan data hasil evaluasi kelembagaan mandiri pada Kementerian/Lembaga bidang Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi; dan
3. Melakukan verifikasi/validasi atas evaluasi mandiri yang telah dilakukan oleh K/L melalui kegiatan Focused Group Discussion (Diskusi Terpumpun) dan Konsinyering.

Pada tahun 2024, skor komposit nasional mencapai 71,38, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023, yang berada pada angka 69,82. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai langkah strategis dalam

memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya pada aspek penguatan fungsi organisasi, efisiensi proses kerja, dan peningkatan akuntabilitas kelembagaan.

Secara historis, skor komposit ini telah mengalami peningkatan konsisten sejak tahun 2020. Pada tahun tersebut, target yang ditetapkan adalah skor "cukup efektif" sebesar 41, sedangkan realisasi mencapai skor "efektif" sebesar 60, mencerminkan capaian yang melampaui ekspektasi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 67,06, yang juga melebihi target sebesar 61. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi masing-masing mencapai 68,45 dan 69,82, memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang lebih mendalam dan sistematis. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang mengarah pada penguatan kelembagaan, termasuk penerapan struktur organisasi yang agile, pemetaan proses bisnis yang efisien, serta digitalisasi proses kerja. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis, Organisasi yang baik tidak hanya dilihat dari bentuk strukturnya, tetapi juga bagaimana organisasi tersebut berproses untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan,

Mengingat organisasi bersifat dinamis, maka perlu dilakukan evaluasi kelembagaan bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, Evaluasi ini dilakukan mengingat tantangan organisasi kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut,

Hasil evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan, dan mengacu pada Permen-PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)

tahun sekali, Dalam Permen-PANRB tersebut juga disebutkan terdapat 5 tingkatan efektivitas kelembagaan yaitu:

No	Skor	Peringkat	Interpretasi
1.	81-100	Peringkat Komposit 5 (P-5)	Sangat Efektif
2.	61-80	Peringkat Komposit 4 (P-4)	Efektif
3.	41-60	Peringkat Komposit 3 (P-3)	Cukup Efektif
4.	21-40	Peringkat Komposit 2 (P-2)	Kurang Baik
5.	0-20	Peringkat Komposit 1 (P-1)	Tidak Baik

Hasil capaian Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional adalah 71,38 ("efektif"), Skor ini merupakan hasil validasi terhadap 469 K/L/Pemda yang telah menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan mandiri dari tahun 2022 s.d 2024 (periode 3 tahun terakhir) yang terdiri dari 101 K/L, 31 Provinsi dan 337 Kab/Kota yang dapat dilihat tabel berikut ini:

No	Objek evaluasi	Peringkat Komposit				
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif
1	K/L	-	-	-	69	32
2	Pemerintah Provinsi	-	-	2	26	3
3	Pemerintah Kab/Kota	-	1	25	270	41
Total		-	1	27	375	76

Rincian nilai hasil evaluasi kelembagaan masing-masing K/L/Pemda dapat dilihat dalam lampiran Laporan Kinerja ini.

Adapun perbandingan realisasi Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi				
2020	2021	2022	2023	2024
73,98 (Efektif)	67,06 (Efektif)	69,48 (Efektif)	69,82 (Efektif)	71,38 (Efektif)

Berdasarkan analisis tren dan penyesuaian kebijakan makro maupun meso, serta dalam rangka mendukung pencapaian target strategis yang telah berbasis outcome dan menjawab tantangan yang dihadapi, perlu dilakukan perumusan alat ukur efektivitas kelembagaan yang lebih komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, Kementerian PANRB melakukan perumusan indeks kapabilitas kelembagaan yang dapat mengukur outcome evaluasi kelembagaan sebagai pengganti skor peringkat komposit. Sebagai tahap pengembangan kedepan, penting untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam evaluasi kelembagaan saat ini, termasuk dalam skor peringkat komposit, dijadikan dasar dalam perumusan indeks kapabilitas kelembagaan. Hal ini mencakup elemen-elemen yang tidak hanya menilai struktur dan proses organisasi, tetapi juga outcome yang lebih spesifik. Outcome ini harus mencakup hasil nyata yang berkontribusi pada efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tren 5 tahun sebelumnya dan asumsi bahwa ada penurunan nilai pada tahun pertama implementasi Indeks kapabilitas kelembagaan (2026), berikut adalah rencana tindak lanjut perumusan indeks kapabilitas kelembagaan beserta dengan perkiraan perolehan nilai Indeks tersebut:

- 2025: Dilakukan penyempurnaan rancangan konsep serta uji coba pada internal Kementerian PANRB dan beberapa kementerian lain sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Menteri PANRB tentang Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang akan ditetapkan pada tahun yang sama. (Tidak dilakukan penilaian evaluasi kelembagaan pada tahun ini)
- 2026: Piloting dilakukan pada beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nilai 63,00 (penurunan 8,38 poin dibandingkan 2024),

penurunan ini mencerminkan dampak dari penerapan dimensi baru yang lebih kompleks.

- 2027: Monitoring dan pembinaan, asistensi, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, dan melakukan perencanaan penataan. Nilai hasil monitoring dan asistensi diperkirakan menjadi 65,08 (naik 2,08 sebagai koreksi hasil evaluasi tahun sebelumnya).
- 2028: Evaluasi dilakukan setiap dua tahun sekali, sehingga pada tahun ini evaluasi dilakukan kembali, dengan populasi evaluasi adalah seluruh instansi pemerintah. Nilai 68,54 (+3,46), setelah tahun pertama pelaksanaan mengalami penurunan, implementasi indeks pada tahun ini diharapkan mulai menunjukkan hasil positif dengan penyesuaian indikator.
- 2029: Pada tahun ini dilakukan kembali monitoring dan pembinaan, asistensi, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, guna penyusunan arsitektur kelembagaan pemerintahan baru. Nilai hasil monitoring dan asistensi ini dikoreksi menjadi 70,62 (+2,08). Peningkatan yang lebih stabil, terjadi seiring dengan konsolidasi kelembagaan dan perbaikan sistem.

Dimensi baru dalam Indeks kapabilitas kelembagaan kemungkinan akan mempengaruhi penilaian secara keseluruhan, yang mungkin akan mengarah pada penurunan nilai sementara, hal ini dikarenakan proses adaptasi terhadap indikator yang lebih kompleks. *Forecasting* dilakukan dengan penurunan target yang lebih moderat, karena transisi ke Indeks kapabilitas kelembagaan membutuhkan waktu untuk pengukuran dan pencapaian outcome yang lebih menyeluruh.

1.2 Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda, Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda,

Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2023 menggunakan Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik, Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Hasil pengukuran Indeks Maturitas SPBE pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	K/L/Pemda	Jumlah yang dievaluasi	Predikat “Baik” ke atas	%
1	K/L	92	89	96.74
2	Pemerintah Provinsi	38	32	84.21
3	Pemerintah Kab/Kota	508	352	69.29
Total		638	473	

Nama K/L/Pemda yang telah mencapai predikat SPBE “Baik” dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Perbandingan realisasi Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas
Tahun 2020 s.d 2024**

Realisasi				
2020	2021	2022	2023	2024

247	159	159	388	473
-----	-----	-----	-----	-----

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 adalah karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3 Indeks SPBE Nasional

Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2024 menghasilkan Indeks SPBE Nasional sebesar 3,12, Terjadi kenaikan signifikan sebesar 0,33 dari nilai indeks sebelumnya yaitu 2,79 pada tahun 2024, Realisasi tersebut sudah mencapai 109,47% dari yang ditargetkan di tahun 2024 yaitu 2,85.

Adapun Perbandingan realisasi Indeks SPBE Nasional tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut

Indeks SPBE Nasional Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi				
2020	2021	2022	2023	2024
2,26	2,24	2,34	2,79	3,12

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 pada indikator ini juga, karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2024, kembali dilakukan perubahan pedoman tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE, yaitu dari pedoman sebelumnya, yakni Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023, yang memuat instrumen, tata cara, kaidah, dan etika penilaian pemantauan serta evaluasi SPBE, telah dicabut dan digantikan

dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan ini menjadi penting karena diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian pedoman tersebut dengan kebijakan strategis SPBE yang lebih aktual, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pemantauan SPBE secara nasional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan terkini dalam transformasi digital pemerintahan.

Perubahan utama dalam pedoman Menteri PANRB tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE mencakup beberapa isu penting yang tersebar di empat domain, yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan, meliputi;

1. Pembangunan aplikasi harus selaras dengan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, namun tetap menyesuaikan standar minimal, yang masuk pada domain Kebijakan dan Tata Kelola.
2. Penyusunan Arsitektur SPBE wajib mengacu pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE versi 2, yang juga termasuk ke dalam domain Tata Kelola.
3. Penerapan manajemen SPBE harus berfokus pada implementasi kebijakan manajemen SPBE di IPPD, untuk memenuhi kebutuhan teknis pendelegasian dan praktik lapangan, berada pada domain Manajemen.
4. Kriteria tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan SPBE mengikuti Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024.
5. Pelaksanaan audit teknologi dan keamanan terhadap aplikasi dan infrastruktur SPBE, sesuai Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 dan ketentuan BSSN
6. Pemanfaatan portal nasional untuk layanan publik dan administrasi pemerintahan, serta konsolidasi aplikasi SPBE ke dalam satu portal layanan.

Secara umum, perubahan pedoman ini memastikan instrumen penilaian tetap selaras dengan arah kebijakan SPBE dan memperhatikan pemenuhan kriteria yang telah berlaku sebelumnya, tanpa menambah atau mengubah substansi indikator secara mendasar. Dinamika arah kebijakan diakomodasi dengan menyesuaikan kriteria dan kondisi pemenuhan, sekaligus memperluas ruang lingkup kriteria untuk optimalisasi implementasi SPBE. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan digital, memastikan tercapainya

standar teknis yang lebih terukur, serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan SPBE yang efisien, efektif, dan aman.

Dalam rangka meningkatkan capaian di masa mendatang, perlu dilakukan optimalisasi kinerja serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat koordinasi dan integrasi antarinstansi yang menekankan pada pengembangan platform digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric), agar kebermanfaatan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata. Selain itu, perlu dirumuskan strategi khusus dalam mendorong implementasi kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD khususnya pada instansi dengan indeks SPBE di bawah Baik. Rekomendasi lain juga menyangkut peluang dalam memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi, guna mendukung inovasi dalam transformasi digital.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas dan Indeks SPBE Nasional pada tahun 2025, diantaranya:

- 1) Melakukan asistensi (pendampingan) dan piloting kepada K/L/Pemda oleh Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan penerapan dan perbaikan Indeks SPBE sesuai arah dan tujuan penerapan SPBE yang terpadu dan terintegrasi;
- 2) Meminta seluruh K/L/Pemda agar melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian PANRB untuk dilakukan penilaian dokumen (*desk evaluation*): dan
- 3) Melakukan evaluasi SPBE terhadap K/L/P yang belum dievaluasi pada tahun 2025 untuk penyempurnaan data *baseline* hasil evaluasi SPBE secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 2 **Terwujudnya ASN yang Profesional**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya ASN yang Profesional” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1 Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	45,087%	58.42%	129,56
2.2 Skor <i>Employer Branding</i> ASN	59,65%	13.98%	23,44

2.1 Skor *Employee Engagement* ASN

Pengukuran *Skor Employee Engagement* ASN dilakukan agar dapat mengetahui tingkat keterikatan ASN sehingga dapat meningkatkan komitmen serta mempertahankan talenta terbaik ASN

Populasi survei *employee engagement* adalah seluruh pegawai ASN di seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga (lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga nonstruktural), maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Sampel ditetapkan dengan menghitung jumlah sampel minimum menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% (α : 5%) di setiap instansi pemerintah tersebut yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mewakili setiap kelompok jabatan (jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi) dan jenjang jabatan. Hasil *employee engagement* pada level nasional hanya mengolah dari instansi pemerintah yang memiliki jumlah responden sesuai ketentuan tersebut. Dari proses ini, diperoleh sampel sebesar 652.816 pegawai ASN dari 491 instansi.

Setelah dilakukan pengolahan data Survei *Employee Engagement* ASN Tahun 2024 (sebanyak 652.816 responden dari 491 instansi pemerintah) dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (LPPIA FIA UI) maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Skor Employee Engagement Nasional

Kategori	Jumlah	Persentase	Skor NPS (%P - %D)	Predikat
Detractors	35.716	5,74%	58,42%	GREAT
Passives	200.020	30,64%		
Promoters	417.080	63,89%		
Grand Total	652.816	100,00%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan formula *Net Promoter Score* (NPS), diperoleh proporsi *Promoter* sebanyak 63,89% dan proporsi *Detractors* sebanyak 5,47%. Dengan demikian, skor *Employee Engagement* ASN 2024 Nasional adalah sebesar **58,42%**. Skor ini menunjukkan bahwa NPS untuk *Employee Engagement* ASN 2024 Nasional berada pada kategori **GREAT**. Walaupun masih dalam predikat yang sama, capaian ini secara umum sudah meningkat dibandingkan dengan survei pada tahun 2023 yang berada pada skor 42,04%. Secara lengkap trend realisasi skor employee engagement ASN 2024 tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi				
2020	2021	2022 (baseline)	2023	2024
Belum dilakukan pengukuran		14,05%	42,04	58.42%

Faktor Pendukung Keberhasilan:

1. Skor *Employee Engagement* ASN 2024 Nasional adalah sebesar 58,42%. berdasarkan formula Net Promoter Score (NPS), diperoleh proporsi Promoter sebanyak 63,89% dan proporsi Detractors sebanyak 5,47%.
2. Strategi 6P yang paling banyak disebutkan sebagai alasan adalah Strategi P1 – Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur (28,69%). Persentase positif terbesar ada

di dalam Strategi P4 – Pengembangan Talenta dan Karier SDM Aparatur (96,41%). Artinya pada responden yang memiliki *top of mind* alasan terkait Strategi P4, 96,41% diantaranya memiliki impresi positif atas strategi tersebut.

3. Pada Strategi P3 – Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur, alasan yang paling banyak disebutkan terkait dengan penghargaan dan pengakuan ASN (92,25%). Setiap kategori alasan sudah memiliki sentimen positif > 90%;
4. Pada Strategi P5 – Percepatan Transformasi Digital ASN hanya terdapat kategori jawaban tentang platform digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. Alasan ini mendapatkan sentimen positif sebesar 96,27%.
5. Pada Strategi P6 – Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur, alasan yang paling banyak disebutkan terkait dengan pengadaan ASN (42,63%). Setiap kategori alasan sudah memiliki mayoritas sentimen positif > 80%.

Sebagai tindak lanjut atas pengukuran kinerja skor *employee engagement* tahun 2022 s.d 2024, maka pada tahun selanjutnya Kementerian PANRB tidak akan menjadikan indikator ini menjadi indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja berikutnya.

2.2 Skor *Employer Branding* ASN

Skor *Employer Branding* ASN merupakan gambaran tingkat ketertarikan masyarakat non-ASN untuk bergabung menjadi ASN serta mengetahui citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi ASN. Tujuan penyelenggaraan Skor *Employer Branding* ASN adalah mengetahui tingkat ketertarikan masyarakat non-ASN untuk bergabung menjadi ASN serta mengetahui citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi ASN.

Pada survei *Employer Branding*, sampel diambil secara purposive dari populasi masyarakat non-ASN kepada:

- 1) Mahasiswa PTN dan PTS tertentu;

- 2) Pegawai swasta, pegawai BUMN, pegawai BUMD tertentu pada berbagai jenjang jabatan mulai entry level, middle level, hingga executive level; dan
- 3) Diaspora (WNI yang berada di luar negeri) yang merupakan mahasiswa dan pegawai profesional.

Total responden survei *Employer Branding* (EB) tahun 2024 adalah sebanyak 3.870 orang, terdiri dari 125 orang merupakan diaspora (WNI di Luar Negeri) dan 3.745 orang responden dalam negeri. Berdasarkan karakteristiknya, responden terdiri dari 1.779 mahasiswa (45,97%) dan 2.091 pegawai (54,03%). Jumlah ini menurun dibandingkan dengan responden pada tahun 2023 sebanyak 6.129 orang. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah responden mahasiswa dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 1.339 menjadi 1.779 mahasiswa. Responden mahasiswa terdiri dari 1.730 responden dalam negeri dan 49 responden diaspora. Responden pegawai mengalami penurunan dari 4.790 menjadi 2.091 orang yang terdiri dari 2.015 responden dalam negeri (147 pegawai swasta, 1.006 pegawai BUMD, dan 862 pegawai BUMN) serta 76 responden diaspora yang merupakan pegawai profesional.

Inisiasi peningkatan skor NPS secara umum adalah dengan meningkatkan *customer satisfaction on customer loyalty* (Rane, et al, 2023). Konsep NPS memang berawal dari sektor privat, tetapi seiring perkembangan kompleksitas lingkungan lokal dan global, bisa diterapkan juga pada sektor publik. Secara khusus, upaya peningkatan skor NPS dapat dilakukan dengan menelaahdi komponen mana skor NPS paling rendah. Komponen yang rendah tersebut harus diberikan fokus lebih dalam perbaikan berikutnya.

Data pada kategori diaspora menunjukkan bahwa sentimen negatif terjadi pada beberapa kategori berikut yaitu : 1) mobilitas (perpindahan atau mutasi) ASN dengan skor negatif 79,41%; 2) kelas jabatan ASN dengan skor negatif 66,67%; dan 3) budaya dan lingkungan kerja ASN dengan skor negatif 58,16%. Data tersebut mengarahkan fokus ke depan harus diarahkan pada beberapa aspek : pertama, penyesuaian mobilitas ASN dalam hal perpindahan atau mutasi agar dapat menarik karakter kerja diaspora yang terbiasa dengan mobilitas di luar negeri. Kedua, penyesuaian khusus untuk diaspora terhadap kelas jabatan ASN karena jika

diaspora sudah berkarier lama di luar negeri dengan pengalaman banyak cukup enggan ketika akan mengabdikan menjadi ASN di Indonesia yang dikarenakan penyesuaian kelas jabatannya. Ketiga, sosialisasi lebih masif perihal nilai-nilai “BerAKHLAK” kepada para diaspora. Poin ketiga ini misalnya dapat dilakukan pada pelatihan PK LPDP, Pre Departure Training di Australia Awards Scholarship, serta beberapa program beasiswa luar negeri lainnya agar mampu menanamkan nilai serta budaya ASN ke para pelajar yang akan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Data pada kategori pegawai juga menunjukkan hal yang serupa. Dua kategori yang menunjukkan skor rendah adalah pada 1) mobilitas (perpindahan atau mutasi) ASN; dan 2) kelas jabatan ASN. Jika ditelaah dianalisis tabel silang sebelumnya, kategori pegawai yang memiliki skor NPS rendah adalah pada level executive (level tinggi). Oleh karena itu, rekomendasi meningkatkan skor NPS dapat difokuskan pada hal berikut : promosi dan sosialisasi masif perihal pemilihan jabatan pimpinan tinggi yang terbuka. Skema JPT saat ini sudah memungkinkan adanya akuisisi talenta untuk posisi executive. Promosi dan sosialisasi yang masif diharapkan dapat lebih menyentuh kelompok pegawai di level executive tersebut agar berminat terhadap posisi di ASN

Dilihat dari alasan-alasan yang diberikan oleh responden mahasiswa pada survei Employer Branding, apabila dilihat dari alasan-alasan diluar 99 (Tidak Relevan) dan 00 (Tidak Menjawab), maka alasan yang paling banyak diberikan adalah terkait dengan alasan 03 (Jenjang karier ASN – Pengembangan dan kepastian karier) dan paling sedikit adalah yang terkait dengan 13 (Platform digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional). Dilihat dari sentimen yang diberikan oleh responden atas setiap alasan, sebagian besar alasan (10 dari 15 yang tersedia) memiliki persentase sentimen positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sentimen negatifnya. Alasan-alasan yang memiliki sentimen negatif lebih besar dibandingkan dengan sentimen positifnya adalah budaya dan lingkungan kerja ASN; citra ASN (employer branding ASN); mobilitas (perpindahan atau mutasi) ASN; kelas jabatan ASN; dan alasan lainnya. Diantara seluruh alasan yang ada, proporsi sentimen negatif terbesar pada responden mahasiswa adalah mobilitas ASN

(79,41%) dan proporsi sentimen positif terbesar adalah jenjang karier ASN (pengembangan dan kepastian karier) yaitu sebesar 84,70 persen.

Dan jika dilihat dari alasan-alasan yang diberikan oleh responden pegawai pada survei Employer Branding, apabila dilihat dari alasan-alasan di luar 99 (Tidak Relevan) dan 00 (Tidak Menjawab), maka alasan yang paling banyak diberikan adalah terkait dengan alasan 03 (Jenjang Karier ASN (pengembangan dan kepastian karier)) dan paling sedikit adalah yang terkait dengan 10 (Kelas jabatan ASN). Dilihat dari sentimen yang diberikan oleh responden atas setiap alasan, sebagian besar alasan (12 dari 15 yang tersedia) memiliki persentase sentimen positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sentimen negatifnya. Pada responden pegawai dapat terlihat bahwa porsi responden tidak menjawab alasannya lebih banyak yaitu 23 orang (1,10%) jika dibandingkan dengan responden mahasiswa yang hanya 6 orang (0,34%).

Faktor penyebab rendahnya pencapaian target employer branding ASN 2024 adalah, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan responden terkait ruang lingkup/status pegawai yang termasuk ASN;
2. Mindset generalisasi yang mungkin melekat dalam responden, sehingga ketika mendapatkan pelayanan yang kurang baik dalam pelayanan publik berdampak ke perspektif umum mereka tentang ASN secara keseluruhan;
3. Menjamurnya *Gig Economy*, Generasi muda cenderung memilih sistem kerja dan jam kerja yang fleksibel dan tidak terikat pada satu organisasi/perusahaan. Tentu sistem tersebut berbeda 180 derajat dengan system kerja yang berlaku dalam mayoritas Instansi Pemerintah.

Dan sama dengan pengukuran skor employee engagement, Sebagai tindak lanjut atas pengukuran kinerja skor *employer branding* tahun 2022 s.d 2024, maka pada tahun selanjutnya Kementerian PANRB tidak akan menjadikan indikator ini menjadi indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja berikutnya.

Berikut adalah trend realisasi hasil pengukuran atas skor employer branding pada tahun 2022 s.d 2024

Realisasi				
2020	2021	2022 (baseline)	2023	2024
Belum dilakukan pengukuran		6,90%	56,81%	13.98%

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” adalah sebagai berikut:

Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L	100%	100%	100%
	Prov	100%	100%	100%
	Kab/ Kota	80%	85,24%	106,55

3.1 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya, Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan
3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang

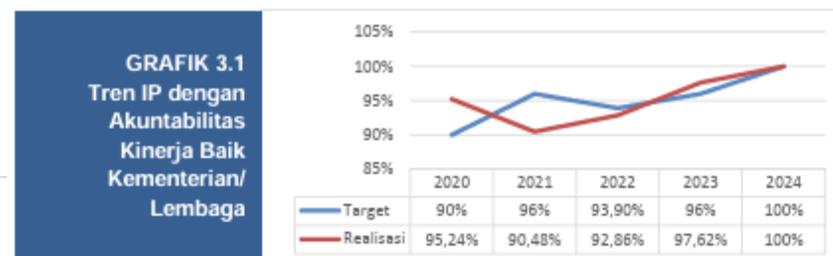
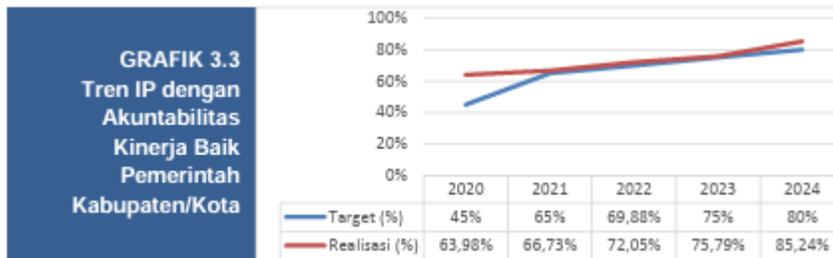
7.	>0 – 30	D	Sangat Kurang
----	---------	---	---------------

Berdasarkan tabel di atas, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja **“Baik”** adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 60 (enam puluh) atau memiliki predikat B ke atas,

Rincian K/L/Pemda dengan nilai akuntabilitas kinerja **“Baik”** ke atas, adalah sebagai berikut:

Instansi	Populasi	Predikat				Total	%
		B	BB	A	AA		
K/L	83	32	40	11	0	83	100.00
Pemerintah Provinsi	34	17	11	5	1	34	100.00
Pemerintah Kab/Kota	508	340	76	15	2	433	85,24

Perkembangan instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja **“Baik”** terus meningkat, baik itu pada tingkat K/L, maupun pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.



Trend realisasi Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” keatas tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"

IP	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
K/L	95,24%	95,06%	95,06%	97.62%	100%
Prov	97,06%	100,00%	100,00%	100.00%	100%
Kab/Kota	63,98%	65,75%	72,05%	77.15%	85,24%

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B” ke atas) antara lain:

- 1) Pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
- 2) Instansi pemerintah masih dalam proses menyempurnakan SAKIP yang diterapkan dengan berpedoman pada peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan PANRB Nomor 89 Tahun 2021
- 3) keterbatasan personel dalam melakukan bimbingan teknis dan asistensi;

- 4) keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak semua bimbingan teknis dan asistensi dapat dilaksanakan secara langsung bagi daerah yang memiliki kendala jaringan, Sinergi dengan *stakeholder* lain belum optimal,



Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2024 Kementerian PANRB secara intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan atas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah,

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel antara lain:

- 1) Optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis dan pemberian materi via tayangan Youtube "Tanya KemenPANRB";
- 2) Memprioritaskan asistensi instansi pemerintah yang berpredikat di bawah B.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1 Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	163 IP	192 IP	117.79

4.1 Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM

Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM diukur dari jumlah kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki unit kerja pelayanan percontohan WBK/WBBM pada tahun bersangkutan.

WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/ WBBM) akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi.

Hingga Tahun 2024, sebanyak 192 instansi pemerintah telah memiliki unit kerja yang berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan persentase capaian sebesar 117,79% jika dibandingkan dengan target 163 instansi pemerintah. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2024 pada dokumen reuiu, dengan target sebanyak 163 IP maka pada Tahun 2024 target telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 117, 79%.

Perkembangan instansi pemerintah yang telah memiliki unit berpredikat WBK/WBBM sejak Tahun 2014 cukup fluktuatif tapi cenderung meningkat hingga tahun 2020. Hal tersebut didukung upaya Deputy RBKunwas dalam mendorong instansi pemerintah untuk membangun setidaknya satu unit kerja untuk dijadikan unit percontohan dan memberikan reward bagi unit kerja yang berhasil menjadi unit

berpredikat ZI WBK/WBBM. Perkembangan instansi pemerintah yang telah memiliki unit berpredikat WBK/WBBM adalah sebagaimana GRAFIK 3.4. berikut:

Dalam rangka mendorong Pembangunan ZI di instansi Pemerintah khususnya Provinsi dan Kab/Kota, dilakukan pembinaan di beberapa pemerintah daerah dalam bentuk coaching clinic. Selain itu, dilakukan strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah melalui program *One Local Government One ZI* (OLGOZI).

Langkah awal program OLGOZI yaitu pembinaan Asistensi ZI yang dilaksanakan bersamaan dengan aksi pencanangan ZI secara serentak pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan tempat acara di Kota Batam. Fokus OLGOZI adalah mendorong unit kerja yang memiliki pelayanan langsung berdampak pada masyarakat, yakni:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
 - a) database kependudukan yang terus diperbarui;
 - b) meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - c) pelayanan dukcapil yang gratis, mudah, dan cepat.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP)
 - a) terdapat peta potensi investasi yang terus diperbarui dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - b) meningkatnya nilai/realisasi investasi; dan
 - c) pelayanan DPMPTSP dengan biaya sesuai standar, mudah, dan cepat.

- 3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - a) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berjalan terpadu dan optimal; dan
 - b) pelayanan RSUD dengan biaya sesuai standar, mudah, dan cepat.

Untuk meningkatkan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM terutama pada pemerintah daerah, diperlukan berbagai upaya diantaranya yaitu:

- 1) TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
- 2) meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
- 3) membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi, serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholders untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
- 4) meningkatkan manajemen kinerja yang baik sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi;
- 5) mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama, terutama layanan yang terkait langsung dengan masyarakat; dan
- 6) mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN).

Perbandingan realisasi jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM di sektor strategis tahun 2020 s.d 2024 adalah:

Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM (kumulatif)

Realisasi

2020	2021	2022	2023	2024
128	142	149	156	192 IP

Dengan memperhatikan hasil pengukuran pada Tahun 2024, maka tahun 2025 direncanakan akan dilakukan perubahan terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di sektor strategis ini, yaitu:

- 1) Mendorong K/L/Pemda untuk melakukan replikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja menuju WBK/WBBM ke unit-unit kerja lainnya;
- 2) Mendorong penguatan peran APIP pada setiap K/L/Pemda sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada instansinya masing-masing,

Sasaran Strategis 5
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional	4,00	4,02	100,50

5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional

Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik. Merujuk ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

diberikan mandat untuk melakukan hal tersebut. Pelayanan publik yang menjadi fokus utama pemerintah perlu dipastikan kinerjanya agar sampai dan dirasakan masyarakat. Maka dari itu Kementerian PANRB memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas pelayanan publik secara nasional melalui mekanisme PEKPPP.

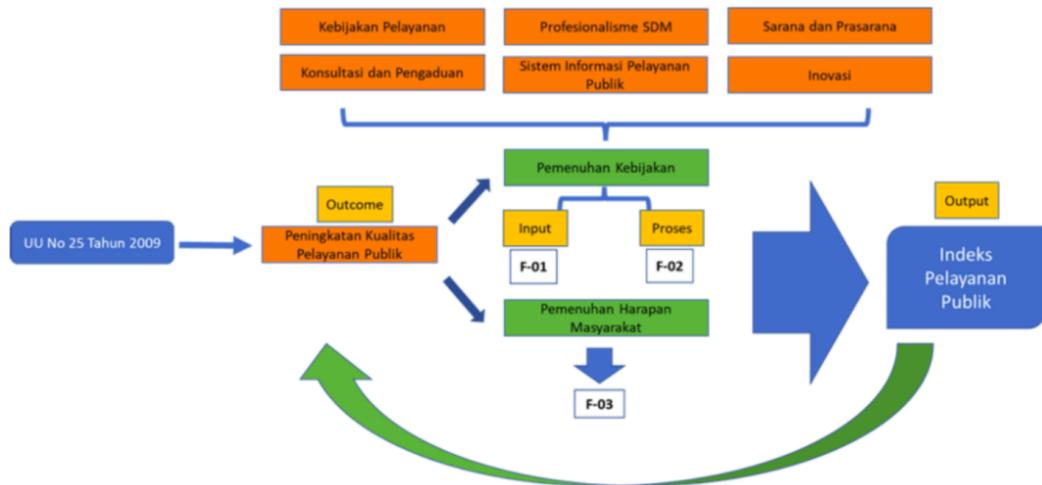
Pengaturan mengenai PEKPPP pada tahun 2023 mengalami pemutakhiran melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemutakhiran ini meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang merupakan kegiatan terpisah. Hal-hal terkait dengan skema, mekanisme, dan tahapan PEKPPP tetap dilakukan sesuai ketentuan. Dalam rangka kemandirian dan pembinaan yang efektif pada tahun 2023 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan PEKPPP secara mandiri. PEKPPP Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEKPPP Secara Mandiri.

Melalui pelaksanaan PEKPPP ini digambarkan sebagai tata kelola pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Adapun skema yang dilakukan dengan melibatkan 6 (enam) aspek yang bobot penilaiannya telah ditentukan sebagai berikut:

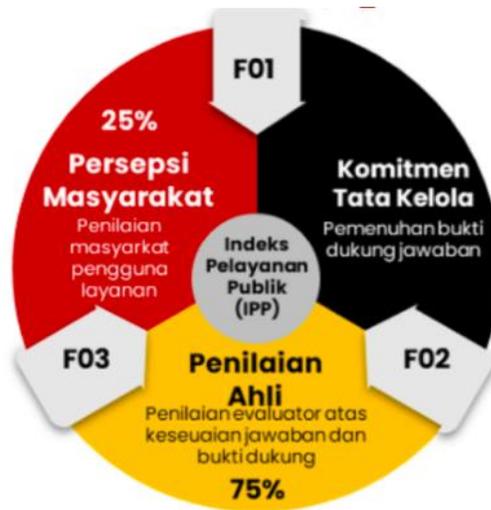


Elaborasi dari aspek dan prinsip pelayanan publik ini yang kemudian menjadi 30 indikator pertanyaan. Pemenuhan pertanyaan ini yang menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Mekanisme PEKPPP sendiri dilakukan berdasarkan pelaksanaan input-proses-output dan outcome yang secara alur berpikir sebagai berikut:



Dari sisi input dibagi menjadi dua yaitu proses pemenuhan kebijakan dan harapan masyarakat. Pemenuhan kebijakan dilakukan melalui pengisian bukti dukung sesuai dengan indikator pertanyaan melalui formulir 01 (F-01). Sedangkan pemenuhan harapan dilakukan melalui pengukuran persepsi masyarakat melalui formulir 03 (F-03). Dari tahapan ini kemudian dilakukan penilaian oleh evaluator untuk menguji kesesuaian pertanyaan dengan bukti dukung yang disampaikan melalui formulir 02 (F-02), yang kemudian menghasilkan angka IPP. Adapun metode penilaian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:

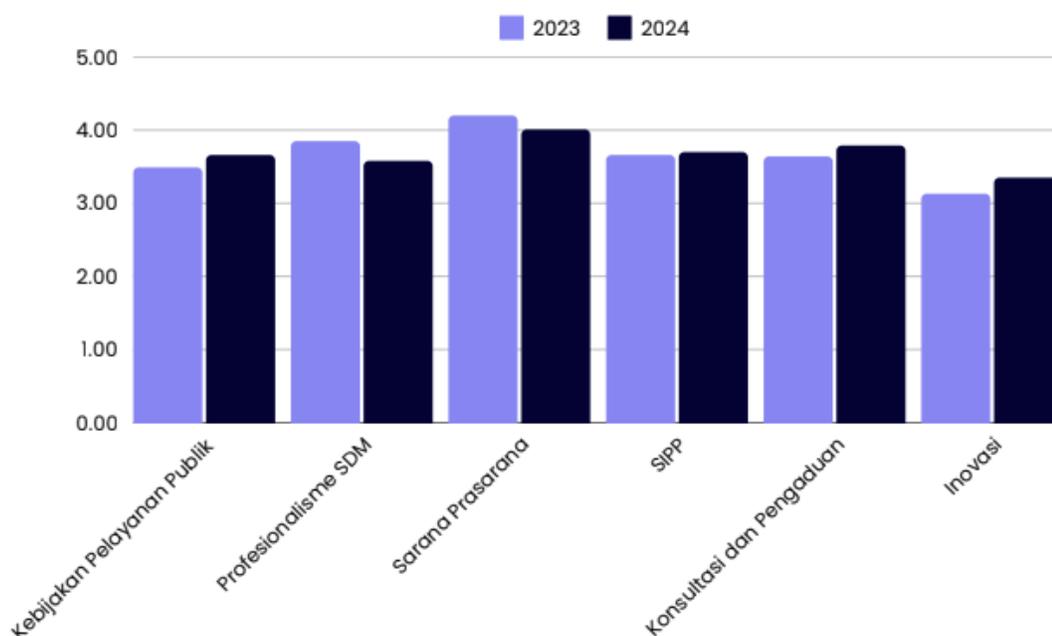


Berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berikut merupakan kategori dari indeks pelayanan publik:

No	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
1,	4,51 -5,00	Kategori A	Pelayanan Prima
2,	4,01 -4,50	Kategori A-	Sangat Baik
3,	3,51 -4,00	Kategori B	Baik
4,	3,01-3,50	Kategori B-	Baik dengan Catatan
5,	2,51 - 3,00	Kategori C	Cukup
6,	2,01 -2,50	Kategori C-	Cukup dengan Catatan
7,	1,51 -2,00	Kategori D	Buruk
8,	1,01- 1,50	Kategori E	Sangat Buruk
9,	0,00 - 1,00	Kategori F	Gagal

Pada Tahun 2024 IPP mengalami kenaikan menjadi 3,78 menjadi 4,02. Adapun secara nasional, Jika dilihat pada masing-masing aspek, Aspek Kebijakan

Pelayanan Publik mendapatkan nilai 3,66; Aspek Profesionalisme SDM 3,58; Aspek Sarana Prasarana 4,01; Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 3,70; Konsultasi & Pengaduan 3,79; dan Aspek Inovasi 3,35. Data ini menunjukkan bahwa aspek Sarana Prasarana mendapatkan nilai paling tinggi dan Aspek Inovasi menjadi nilai yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan pelayanan publik, dan di sisi lain bahwa inovasi pelayanan publik harus terus didorong untuk dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.



Gambar. Perbandingan Nilai PEKPPP Nasional per Aspek Tahun 2023 dan 2024

Jika membandingkan dengan capaian aspek PEKPPP tahun 2023 dapat terlihat bahwa sarana prasarana juga memiliki nilai tertinggi sementara inovasi mendapatkan nilai terendah. Meskipun begitu, terdapat kenaikan nilai dari aspek inovasi yang sebelumnya 3,13 menjadi 3,35 di tahun 2024 yang menunjukkan adanya progress terkait inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari pelaksanaan kegiatan dan capaian yang dilakukan pada tahun 2024 dapat ditarik beberapa catatan penting, antara lain:

- a. Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal, kolaborasi yang terjalin antar pihak terkait masih perlu dilakukan perbaikan. Sistem informasi yang

digunakan dalam PEKPPP yaitu <https://ivaluasi.minpan.go.id/> masih terdapat banyak kekurangan terutama saat proses evaluasi berlangsung. Hal ini cukup mengganggu proses pengunggahan bukti dukung dan pengolahan data yang optimal;

- b. Keterlibatan evaluator pada level kabupaten/kota belum secara merata kualitasnya. Hal ini juga berpengaruh pada proses pendampingan dan kualitas penilaian;
- c. Pelaksanaan PEKPPP pada wilayah papua masih sulit baik dalam pelaksanaan PEKPPP secara khusus maupun pembinaan. Basa transisi pada wilayah Daerah Etonom Baru Papua menjadi pokok utama terkendalanya proses koordinasi. Proses ini baru bisa teratasi secara progres ketika DEB Papua telah siap baik secara SDB maupun infrastruktur;
- d. Penetapan lokus baru untuk ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa khususnya pelayanan barang pada lingkup kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota masih perlu pendampingan khusus. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pemahaman serta proses pendampingan dari masing-masing instansi yang berdampak pada pemenuhan bukti dukung dan hasil nilai IPP; dan
- e. Keterbatasan jumlah SDM pembina pelayanan publik nasional. Beban jumlah instansi koordinasi yang besar membuat proses pembinaan secara nasional tidak efektif dan efisien.

Dari tantangan dan kendala di atas, maka pada tahun 2024 direncanakan akan dilakukan beberapa perbaikan strategi, yaitu:

- a. Perbaikan kualitas sistem informasi <https://ivaluasi.minpan.go.id/> baik secara fitur maupun kualitas server, serta perbaikan pola kerja dan koordinasi pihak yang terkait melalui sistem kerja *squad team*;
- b. Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan evaluasi secara berjenjang untuk level Kabupaten/Kota oleh pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga serta Provinsi oleh pihak ketiga yang dikelola secara profesional. Hal ini dilakukan agar pemahaman evaluator bisa seragam dan kualitas hasil evaluasi lebih maksimal;

- c. Pola koordinasi khusus asimetris pada wilayah Papua dengan membangun skema dan standar tersendiri melalui kolaborasi dengan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat yang secara tugas dan fungsi membidangi pelayanan publik khusus wilayah Papua;
- d. Pelaksanaan evaluasi menyeluruh pada ULE yang pernah dilakukan evaluasi pada rentang waktu 2020-2024 guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik serta adanya transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman antar ULE;
- e. Penambahan SDB sesuai dengan peta jabatan yang telah disusun guna melakukan akselerasi capaian kinerja.

Perbandingan realisasi IPP tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 s,d 2023

2020	2021	Realisasi 2022	2023	2024
3,84	3,79	3,88	3,78	4,02

**Sasaran Strategis 6
Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional**

Capaian indikator-indikator sasaran “Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional” adalah sebagai berikut:

Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1 Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (kategori "B" ke atas)	K/L	100%	100%	100
	Prov	100%	84,2%	84.20
	Kab/ Kota	70%	81,7%	116.71

6.1 Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (kategori "B" ke atas)

Instansi pemerintah yang memiliki Indeks RB “Baik” adalah instansi pemerintah yang memiliki nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di atas 60,00, atau memiliki predikat “B” ke atas. Evaluasi dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Permen_PANRB tersebut menetapkan bahwa Nilai hasil evaluasi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok berdasarkan rentang nilai, yaitu :

No	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
1.	>90 – 100	AA	Istimewa
2.	>80 – 90	A	Sangat Baik
3.	>70 – 80	BB	Baik
4.	>60 – 70	B	Cukup Baik
5.	>50 – 60	CC	Cukup
6.	>30 – 50	C	Buruk
7.	0 – 30	D	Sangat Buruk

Tahun 2024 merupakan tahun ke-lima atau terakhir dari Renstra periode 2020-2024 dan Road Map RB 2020 – 2024. Kebijakan evaluasi yang membedakan Road Map RB 2020-2024 dengan Road Map RB sebelumnya adalah menggunakan kriteria dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria pada tools evaluasi sebelumnya. Tools evaluasi yang baru menekankan pada aspek reform (30%), penilaian hasil antara (10%), sedangkan aspek pemenuhan hanya sebesar 20%.

Dengan memperhatikan perubahan tingkat kesulitan tersebut, maka Kementerian PANRB menetapkan indikator kinerja ini dengan target-target yang lebih rendah, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Target tahun 2020 - 2024 tersebut telah beberapa kali dibahas dengan Bappenas dan telah disepakati menjadi target RPJMN Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Rincian Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ”Baik” (kategori "B" ke atas), adalah sebagai berikut:

Instansi	Populasi	Predikat				Total	%
		B	BB	A	AA		
K/L	82	5	23	54	-	82	100%
Pemerintah Provinsi	38	3	10	19	-	32	84,2%
Pemerintah Kab/Kota	508	107	176	131	1	415	81,7%

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain:

1. Kurangnya kepemimpinan yang kuat di instansi pemerintah.
Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi.
2. Keterbatasan sumber daya.
Implementasi reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan.
3. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan.
Pegawai yang enggan berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi.
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan banyak instansi pemerintah yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
5. Masalah hukum dan regulasi.
Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan.

Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan teknis secara daring, baik itu melalui sistem aplikasi PMPRB, maupun e-sakip reuiu, sebagai terobosan untuk memecah konstrain jarak, waktu dan biaya, karena dalam situasi pandemi covid-19 yang belum memungkinkan pertemuan tatap muka,.
- 2) Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja baik dengan deputy di Kementerian

PANRB maupun dengan instansi pemerintah lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan RB.

Perbandingan realisasi Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (kategori "B" ke atas) tahun 2020 s.d 2024 adalah:

IP	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
K/L	96,39%	96.30%	98,77%	82,14%	100%
Prov	79,41%	79.41%	88,24%	79,41%	84,2%
Kab/Kota	24,41%	25.79%	32,28%	52,36%	81,7%





Sebagai upaya percepatan implementasi RB, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian PANRB di antaranya:

- 1) Mendesain ulang mekanisme asistensi, yang bertujuan agar proses asistensi dapat dilaksanakan lebih profesional dan akuntabel, dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM, dengan membuat kurikulum pelatihan yang diharapkan dapat mengakselerasi proses penyiapan SDM baru yang siap untuk melakukan pendampingan maupun evaluasi terkait implementasi RB
- 3) Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada, seperti PMPRB, PMPZI, *e-SAKIP Review*, Survey, dll. Di antaranya menambahkan pembaharuan seperti aplikasi pendukung evaluasi, dan pendukung *knowledge management* baik di internal maupun instansi pemerintah lain;
- 4) Mendorong kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PANRB untuk melakukan penguatan pada area perubahan yang sesuai dengan bidang tanggungjawabnya; dan
- 5) Membangun kerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan terkait *reward and punishment* di pemerintah daerah. Hal ini juga diharapkan dapat sebagai stimulus untuk percepatan implementasi RB khususnya di kabupaten/kota.

C. Capaian Kinerja Lain

C.1 Capaian Rencana Strategis 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2019 (Baseline)	Target 2024	Realisasi 2024 (Akhir Periode Renstra)	Keterangan
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL	73,66	80	82,17	Menggunakan data sementara, sebelum masa sanggah
		Prov	63,70	71	74,70	
		Kab/Kota	55,46	67	70,55	
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Nasional		N/A	Skor 61 (Efektif)	Skor 71,38 (Efektif)	
	Indeks SPBE Nasional		N/A	2.6	3,12	
	Jumlah K/L/D yang mencapai predikat SPBE “Baik”		196	371	473	
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit ASN Nasional		0,57	0,8	0,8	Menggunakan hasil pengukuran KASN per Semester I 2024
	Indeks Profesionalitas ASN Nasional		63,83	80	80	Menggunakan hasil pengukuran BKN Tahun 2023
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja rata- rata Nasional		65,95	71	71	69,91
	% K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” keatas	KL	94,12	100%	100%;	100%
		Prov	97,06%	100%	100%;	100%
Kab/Kota		57,28%	100%	100%	85,24%	
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis		N/A	500 Unit Kerja	500 Unit Kerja*	Merupakan realisasi tahun 2023. Sejak tahun 2024 tidak lagi menjadi indikator kinerja Kementerian PANRB

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019 (Baseline)	Target 2024	Realisasi 2024 (Akhir Periode Renstra)	Keterangan
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,63	3.75	4,02	
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	% K/L/D yang memiliki Indeks RB "Baik"	KL	95,29%	100%	100%
		Prov	73,53%	100%	84,2%
		Kab/Kota	25,20%	100%	81,7%
Tujuan 2: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan Kapabel	Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB	81,66	83	85,31	Menggunakan realisasi 2023
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB	Efektif	Skor 61 (Efektif)	Skor 82,64 (Sangat Efektif)	
	Indeks SPBE Kementerian PANRB	Baik	Sangat Baik	Memuaskan	
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB	N/A	0,9	0,9	Menggunakan realisasi 2023
	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB	N/A	80	80	Menggunakan realisasi 2023
Sasaran Strategis 9:	Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB	80,68	85	81,15	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019 (Baseline)	Target 2024	Realisasi 2024 (Akhir Periode Renstra)	Keterangan
Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima	Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB	3,36	3.75	4,28	

C.2 Capaian Indikator Rencana Kerja Pemerintah 2024 terkait Kementerian PANRB

Nama Prioritas RKP 2024	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PN 07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional	4,00	4,02	101,50	
PP 07.04: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola					
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	KL	4,20	4,39	104.52
		Prov	4,00	3,97	99.25
		Kab/Kota	3,80	3,75	98.68
KP 07.04.01: Transformasi Manajemen SDM Aparatur					
Sasaran: Meningkatnya skor <i>employee engagement</i> dan <i>employee branding</i>	<i>skor employee engagement</i>	15.48%	58.42%	377.39	
	<i>Skor employer branding</i>	7,66%	13,98%	182.51	
PRO-P 07.04.01.01: Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding					
Sasaran: Terwujudnya pelaksanaan core values ASN BerAKHLAK	Hasil Pengukuran Indeks BerAKHLAK	67.13%	68,10%	101,44	
PRO-P 07.04.01.02: Percepatan Peningkatan Kapasitas SDMA					
Sasaran: Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN melalui fitur <i>learning</i> pada platform tunggal	Persentase Pegawai ASN yang aktif menggunakan fitur <i>learning</i> pada platform tunggal	20%	23,55%	117,75	

Nama Prioritas RKP 2024	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
PRO-P 07.04.01.03: Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan				
Sasaran: Terlaksananya <i>piloting</i> kebijakan manajemen kesejahteraan di Instansi Pemerintah	Jumlah IP yang dilakukan <i>piloting</i> terkait kebijakan manajemen kesejahteraan	12 K/L	12 K/L	100
PRO-P 07.04.01.04: Pengembangan Talenta dan Karir				
Sasaran: Terwujudnya manajemen talenta di Instansi Pemerintah	Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN	100%	100%	100
PRO-P 07.04.01.05: Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN				
Sasaran: Terwujudnya platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	Persentase IP yang menggunakan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	100%	100%	100
PRO-P 07.04.01.06: Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur				
Sasaran: Terlaksananya <i>piloting</i> kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	Jumlah IP yang dilakukan <i>piloting</i> kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	8 K/L	14 K/L	175
KP 07.04.02: Transformasi Pelayanan Publik				
Sasaran: Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kinerja pelayanan publik	86	88,43	102,83

Nama Prioritas RKP 2024	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
PRO-P 07.04.02.01: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi				
Sasaran: Terlaksananya Pelayanan Publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	Skor Indeks pada domain layanan pada SPBE	3,14	3,84	122,29
PRO-P 07.04.02.03: Penguatan Ekosistem Inovasi				
Sasaran: Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	Persentase inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik	82%	35%	42,68
KP 07.04.03: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis				
Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan Pembangunan nasional	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	61	71,38	117,02
PRO-P 07.04.03.01: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang Efektif				
Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan	Jumlah instansi yang ditata kelembagannya	21 K/L	28 K/L	133,33%
PRO-P 07.04.03.02: Penerapan SPBE Terintegrasi				
Sasaran: Meningkatnya nilai indeks SPBE Nasional	Nilai Indeks SPBE Nasional	2,60	3,12	120%

Nama Prioritas RKP 2024	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
KP 07.04.04: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan					
Sasaran: Terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Reformasi Briorkasi	K/L	80	82,98	103.73%
		Prov	71	74,63	105.11%
		Kab/Kota	67	69,46	103.67%
PRO-P 07.04.04.01: Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi					
Sasaran: Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	Persentase rekomendasi RB Nasional yang ditindaklanjuti	70%	100%	142,86	

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2024 adalah sebesar **Rp417.285.288.000,-**, namun dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, anggaran perjalanan dinas (akun 524xxx) diblokir sebesar **Rp9.261.725.000,-** sehingga pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan oleh Kementerian PANRB tahun 2024 adalah sebesar **Rp408.023.563.000,-**, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp401.172.466.950,-** atau sebesar 98,32%. dengan rincian per program dan per kegiatan sebagai sebagai berikut:

Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran*	Realisasi**	
		Rp	%
Program 1: Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	139,171,731.00	136,100,984.31	97.79%

Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran*	Realisasi**	
		Rp	%
Kegiatan 1a: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,515,151.00	3,490,308.12	99.29%
Kegiatan 1b: Perumusan Kebijakan PANRB	15,016,414.00	14,490,830.04	96.50%
Kegiatan 1c: Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	2,002,000.00	1,954,550.76	97.63%
Kegiatan 1d: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	26,388,123.00	25,193,076.39	95.47%
Kegiatan 1e: Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	14,951,289.00	14,618,259.27	97.77%
Kegiatan 1f: Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana	8,984,201.00	8,898,896.02	99.05%
Kegiatan 1g: Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur	42,307,519.00	41,880,941.35	98.99%
Kegiatan 1h: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	26,007,034.00	25,574,122.38	98.34%
Program 2: Dukungan Manajemen	268,851,832.00	265,071,482.64	98.59%
Kegiatan 2a: Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	1,001,078.00	995,526.05	99.45%
Kegiatan 2b: Pengelolaan Legislasi dan Litigasi	728,487.00	720,869.72	98.95%
Kegiatan 2c: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	13,875,773.00	13,512,515.31	97.38%
Kegiatan 2d: Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	219,685,774.00	216,786,345.54	98.68%

Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran*	Realisasi**	
		Rp	%
Kegiatan 2e: Pengelolaan Sistem dan Teknologi	11,642,690.00	11,577,141.55	99.44%
Kegiatan 2f: Pengelolaan Organisasi dan SDM	15,489,054.00	15,090,191.16	97.42%
Kegiatan 2g: Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6,428,976.00	6,388,893.31	99.38%
TOTAL	408,023,563.00	401,172,466.95	98.32%

Sumber: Realisasi SP2D berdasarkan aplikasi MONSAKTI



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 7 dari 13 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 7 (tujuh) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 (tiga) target: dan

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2024 Kementerian PANRB juga menjadi tinggi yaitu sebesar **Rp401,172,466.950,-** atau 98,32% dari total pagu anggaran yang tersedia digunakan sebesar **Rp408.023.563.000,-**.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Hasil Evaluasi Kelembagaan

Kementerian/Lembaga	Hasil Evaluasi Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,64	87,66	P-5
2 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	73,96	86,62	P-5
3 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	80,38	82,44	P-5
4 Badan Pangan Nasional	89,61	80,05	P-5
5 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	77,23	77,63	P-4
6 TVRI	51,35	66,25	P-4
7 Kementerian Keuangan	92,77	93,39	P-5
8 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82,68	84,21	P-5
9 Kementerian Luar Negeri	89,26	87,18	P-5
10 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	86,10	82,78	P-5
11 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	81,52	73,04	P-4
12 Kementerian Perindustrian	73,04	73,04	P-4
13 Kementerian Badan Usaha Milik Negara	75,86	79,88	P-4
14 Badan Siber dan Sandi Negara	66,73	70,74	P-4
15 Kementerian Sekretariat Negara	70,87	71,20	P-4
16 Kantor Staf Presiden	70,87	71,20	P-4
17 Kementerian Perhubungan	77,40	70,02	P-4
18 Kementerian Komunikasi dan Informatika	78,18	70,17	P-4
19 Sekretariat Kabinet	72,92	73,25	P-4
20 Sekretariat Dewan Pers	70,06	70,17	P-4
21 Sekretariat Komisi Informasi Pusat	66,76	70,17	P-4
22 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	61,49	70,17	P-4
23 Kementerian Ketenagakerjaan	68,41	68,81	P-4
24 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	68,41	68,81	P-4
25 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	88,40	79,18	P-4
26 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	76,62	74,54	P-4

Kementerian/Lembaga	Hasil Evaluasi Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
27 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	76,62	74,54	P-4
28 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	72,49	73,94	P-4
29 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	84,05	71,85	P-4
30 Kementerian Perdagangan	77,90	77,90	P-4
31 Kementerian Pertanian	73,80	79,80	P-4
32 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79,90	77,60	P-4
33 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	74,12	75,20	P-4
34 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	74,13	75,20	P-4
35 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	74,10	75,20	P-4
36 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	70,70	79,75	P-4
37 Badan Pusat Statistik	65,60	61,50	P-4
38 Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	66,30	69,80	P-4
39 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	85,30	81,62	P-5
40 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	68,70	61,50	P-4
41 Badan Informasi Geospasial	53,70	62,20	P-4
42 Badan Pemeriksa Keuangan	84,60	76,63	P-4
43 Kementerian Kelautan dan Perikanan	82,23	91,47	P-5
44 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	79,80	78,80	P-4
45 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)	81,22	72,46	P-4
46 Kementerian Sosial (Kemensos)	83,32	65,70	P-4
47 Kementerian Kesehatan (Kemenkes)	75,84	81,46	P-5
48 Kementerian Agama (Kemenag)	63,34	67,25	P-4
49 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	76,06	78,88	P-4
50 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	92,12	94,67	P-5
51 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	60,32	67,97	P-4
52 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	84,49	85,78	P-5
53 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	85,36	64,37	P-4
54 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	85,87	68,07	P-4
55 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	80,16	64,41	P-4
56 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	59,36	61,74	P-4
57 Perpustakaan Nasional (Perpusnas)	65,12	83,56	P-5
58 Badan Standardisasi Nasional (BSN)	87,08	79,11	P-4
59 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	65,28	63,33	P-4
60 Lembaga Administrasi Negara (LAN)	59,42	85,25	P-5
61 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basamas)	75,11	83,40	P-5
62 Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	81,22	72,46	P-4
63 Sekretariat Badan Amal dan Zakat Nasional (BAZNAS)	63,34	67,25	P-4
64 Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)	92,12	94,67	P-5
65 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	75,84	81,46	P-5
66 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	76,06	78,88	P-4
67 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	83,32	65,70	P-4
68 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	60,32	67,97	P-4
69 Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	84,49	85,78	P-5
70 Kementerian Desa PDTT	91,52	80,61	P-5
71 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	95,50	94,32	P-5

Kementerian/Lembaga	Hasil Evaluasi Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
72 Kementerian Agraria dan Ruang/Badan Tata Pertanahan Nasional	90,64	86,18	P-5
73 Kejaksaan RI	80,03	81,27	P-5
74 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	75,90	78,87	P-4
75 Badan Pengawas Pemilu	85,99	80,61	P-5
76 Kemenko Bidang Polhukam	59,20	72,58	P-4
77 Kementerian Pertahanan	67,78	78,06	P-4
78 Kementerian Dalam Negeri	75,97	72,83	P-4
79 Kementerian Hukum dan HAM	71,83	83,93	P-5
80 Kementerian PUPR	71,09	78,85	P-4
81 Kementerian ATR/BPN	73,79	80,99	P-5
82 Kementerian PANRB	73,85	82,64	P-5
83 Mahkamah Agung RI	69,97	64,48	P-4
84 Mahkamah Konstitusi RI	86,02	82,33	P-5
85 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	68,18	64,15	P-4
86 Lembaga Ketahanan Nasional	70,51	65,79	P-4
87 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	72,35	73,35	P-4
88 Badan Kepegawaian Negara	86,28	82,57	P-5
89 Badan Narkotika Nasional	70,54	70,45	P-4
90 Kejaksaan Republik Indonesia	74,87	79,63	P-4
91 Badan Intelijen Negara	75,97	73,55	P-4
92 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	80,16	70,59	P-4
93 Sekretariat Ombudsman RI	72,63	80,13	P-5
94 Sekretariat Jenderal KPU	67,67	70,61	P-4
95 Badan Pengawas Pemilihan Umum	68,40	68,07	P-4
96 Dewan Ketahanan Nasional	68,74	77,40	P-4
97 Badan Nasional Pengelola Perbatasan	82,73	80,13	P-5
98 Komisi Pemberantasan Korupsi	79,80	71,70	P-4
99 Kepolisian Republik Indonesia	88,41	82,80	P-5
100 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	74,56	71,28	P-4
101 Komisi Kepolisian Nasional	74,37	72,81	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
1 Provinsi Aceh	79,22	72,77	P-4
2 Pemprov Maluku Utara	68,00	63,76	P-4
3 Pemprov NTB	70,50	71,43	P-4
4 Pemprov NTT	70,50	68,64	P-4
5 Provinsi Maluku	75,41	75,21	P-4
6 Provinsi Sulawesi Tenggara	69,31	68,64	P-4
7 Pemprov Sumatera Barat	70,20	68,64	P-4
8 Pemkab Rokan Hulu	82,39	80,06	P-5
9 Pemkab Sikka	68,90	63,29	P-4
10 Pemkab Bungo	75,43	74,08	P-4
11 Pemkab Bantaeng	79,61	75,86	P-4
12 Pemkab Barru	76,78	75,39	P-4
13 Pemkab Tanjung Jabung Timur	69,71	70,31	P-4
14 Pemkab Enrekang	75,28	73,52	P-4
15 Pemkab Jeneponto	78,89	75,64	P-4
16 Pemkab Luwu Timur	64,64	64,10	P-4
17 Pemkab Ogan Komering Ulu	70,32	71,04	P-4
18 Pemkab Luwu	73,30	72,18	P-4
19 Pemkab Pangkajene dan kepulauan	65,06	66,68	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
20 Pemkab Ogan Komering Ilir	72,20	73,04	P-4
21 Pemkab Ogan Kemring Ulu Timur	78,20	78,73	P-4
22 Pemkab Takalar	65,98	68,61	P-4
23 Pemkab Komering Ulu Selatan	86,10	85,21	P-5
24 Pemkab Palopo	63,91	64,69	P-4
25 Pemkab Banyuasin	74,31	71,43	P-4
26 Pemkab Bolaang Mongondow Utara	68,83	66,29	P-4
27 Pemkab Fak Fak	58,46	61,11	P-4
28 Pemkab Bangkalan	75,14	72,93	P-4
29 Pemkab Lahat	69,95	66,26	P-4
30 Pemkab Musi Rawas	70,87	66,26	P-4
31 Pemerintah Kab. Boyolali	73,75	70,87	P-4
32 Pemkab Maluku Tenggara	63,11	61,32	P-4
33 Pemkab Padang Pariaman	84,31	83,30	P-5
34 Pemkab Purbalingga	75,14	72,93	P-4
35 Pemkab SBB	68,21	63,71	P-4
36 Pemkab Seram Bagian Timur	83,38	81,59	P-5
37 Pemkab Agam	69,17	69,85	P-4
38 Pemkab KKT	58,55	59,24	P-3
39 Pemkot Ambon	88,84	88,02	P-5
40 Pemkot Banda Aceh	61,00	63,68	P-4
41 Pemkab Tual	79,93	72,25	P-4
42 Pemkab Blitar	72,09	71,72	P-4
43 Pemkab Dairi	64,72	63,17	P-4
44 Pemkab Karo	67,67	60,11	P-4
45 Pemkab Langkat	66,50	64,97	P-4
46 Pemkab Tapanuli Utara	71,02	67,69	P-4
47 Pemkot Tangerang Selatan	74,40	71,27	P-4
48 Pemkab Kulon Progo	82,05	80,18	P-5
49 Pemkab Lebak	78,33	70,93	P-4
50 Pemkot Cirebon	76,31	70,93	P-4
51 Pemkab Kuningan	74,62	74,14	P-4
52 Pemkab Buol	64,35	63,61	P-4
53 Pemkot Manado	83,60	82,61	P-5
54 Pemkab Flores Timur	61,89	64,92	P-4
55 Pemkab Karimun	87,58	79,43	P-4
56 Pemkab Lingga	79,18	78,43	P-4
57 Pemkab Kepulauan Anambas	68,49	66,33	P-4
58 Pemkot Yogyakarta	80,14	80,18	P-5
59 Pemkab Pasaman	67,89	68,64	P-4
60 Pemkot Mojokerto	66,69	68,50	P-4
61 Pemkab Rote Ndao	80,17	79,40	P-4
62 Pemkab Pasaman Barat	72,92	71,35	P-4
63 Pemkab Madiun	84,59	80,90	P-5
64 Pemkab Ngawi	79,86	77,90	P-4
65 Pemkot Batu	78,16	77,90	P-4
66 Pemkab Talaud	60,60	61,90	P-4
67 Pemkab Wakatobi	79,67	73,90	P-4
68 Pemkab Bangli	72,59	73,90	P-4
69 Pemkab Dompu	73,92	69,90	P-4
70 Pemkab Tulungagung	95,29	88,55	P-5
71 Pemkab Solok Selatan	70,73	72,35	P-4
72 Pemkab Tidore	77,10	70,02	P-4
73 Pemkab Sijunjung	78,32	73,32	P-4
74 Pemkot Padang Panjang	70,41	72,24	P-4
75 Pemkab Ogan Ilir	65,24	65,57	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
76 Pemkot Sawahlunto	73,28	78,41	P-4
77 Pemkot Pagar Alam	68,35	65,46	P-4
78 Pemkab Tasikmalaya	66,09	65,75	P-4
79 Pemkab Pali	74,81	72,50	P-4
80 Pemkab Gunung Kidul	95,27	80,75	P-5
81 Pemkab Tulang Bawang Barat	79,88	70,93	P-4
82 Pemkab Situbondo	86,46	80,75	P-5
83 Pemkab Brebes	78,33	70,93	P-4
84 Pemkab Boalemo	78,14	73,00	P-4
85 Pemkab Tojo Una Una	69,18	62,52	P-4
86 Pemkab Simalungun	82,95	80,71	P-5
87 Pemkab Asahan	77,28	76,96	P-4
88 Pemkab Batubara	77,57	74,13	P-4
89 Pemkab Deli Serdang	77,98	68,12	P-4
90 Pemkab Lebong	69,92	68,02	P-4
91 Pemkab Labuhan Batu	70,73	67,13	P-4
92 Pemkab Labuhan Batu Selatan	89,11	87,11	P-5
93 Pemkab Nias Barat	68,29	68,88	P-4
94 Pemkab Nias Selatan	53,93	61,38	P-4
95 Pemkab Nias Utara	56,35	61,71	P-4
96 Pemkab Nias	66,93	65,67	P-4
97 Pemkab Padang Lawas Utara	74,43	70,02	P-4
98 Pemkab Padang Lawas	75,68	75,34	P-4
99 Pemkab Pakpak Barat	83,22	78,90	P-4
100 Pemkab Samosir	67,25	69,73	P-4
101 Pemkab Serdang Bedagai	86,70	84,77	P-5
102 Pemkab Tapanuli Selatan	68,76	68,99	P-4
103 Pemkab Tapanuli Tengah	68,81	67,48	P-4
104 Pemkab Toba	68,27	66,76	P-4
105 Pemkot Binjai	73,16	71,45	P-4
106 Pemkot Gunung Sitoli	70,52	69,83	P-4
107 Pemkot Medan	60,09	62,72	P-4
108 Pemkot Padang Sidempuan	70,98	70,55	P-4
109 Pemkot Pematang Siantar	82,57	78,71	P-4
110 Pemkot Sibolga	64,15	65,62	P-4
111 Pemkot Tanjung Balai	67,20	69,05	P-4
112 Pemkab Buru	88,32	84,85	P-5
113 Pemkab Kepulauan Aru	78,09	77,34	P-4
114 Pemerintah Kab. Grobogan	70,25	69,97	P-4
115 Pemerintah Kab. Jepara	85,44	88,21	P-5
116 Pemerintah Kab. Kendal	70,11	72,31	P-4
117 Pemerintah Kab. Kotabaru	77,79	66,79	P-4
118 Pemerintah Kab. Muna	72,01	75,51	P-4
119 Pemerintah Kab. Kolaka	81,57	84,40	P-5
120 Pemerintah Kab. Buton Tengah	71,03	72,48	P-4
121 Pemkab Banyuwangi	73,43	81,61	P-5
122 Pemkab Cilacap	63,95	63,86	P-4
123 Pemkot Salatiga	89,11	80,38	P-5
124 Pemkab Tangerang	70,98	69,77	P-4
125 Pemkab Tapin	68,62	65,85	P-4
126 Pemkab Tanah Laut	76,78	75,63	P-4
127 Pemkab Pamekasan	73,24	70,46	P-4
128 Pemkab Banyumas	63,91	62,54	P-4
129 Pemkab Tebo	64,61	63,46	P-4
130 Pemkab Sidoarjo	64,15	62,44	P-4
131 Pemkab Balangan	68,37	69,90	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
132 Pemkab Bone Bolango	68,29	65,74	P-4
133 Pemkab Gorontalo	69,09	64,63	P-4
134 Pemkab Hulu Sungai Utara	69,77	69,90	P-4
135 Pemkab Pohuwato	70,73	73,90	P-4
136 Pemkab Sangihe	63,02	65,60	P-4
137 Pemkab Tagulandang	70,52	62,50	P-4
138 Pemkab Toraja Utara	69,62	67,10	P-4
139 Pemkot Gorontalo	75,70	73,45	P-4
140 Pemkab Gorontalo Utara	62,05	61,90	P-4
141 Pemkot Magelang	92,18	90,14	P-5
142 Pemkot Surabaya	97,77	96,91	P-5
143 Pemkab Magelang	80,12	80,17	P-5
144 Pemkab Sampang	83,20	80,10	P-5
145 Pemkab Blora	73,71	72,20	P-4
146 Pemkot Banjarbaru	83,47	84,08	P-5
147 Pemkot Banjarmasin	72,20	71,92	P-4
148 Pemkab Buton	71,57	70,49	P-4
149 Pemkab Hulu Sungai Selatan	80,46	79,85	P-4
150 Pemkab Demak	72,39	72,83	P-4
151 Prov. Babel	71,28	54,20	P-3
152 Prov. Gorontalo	63,49	72,23	P-4
153 Prov. Jawa Barat	74,00	68,45	P-4
154 Prov. Kalimantan Barat	71,39	60,05	P-4
155 Prov. Kalimantan Tengah	71,34	62,55	P-4
156 Prov. Sulawesi Utara	76,00	64,26	P-4
157 Prov. Sulawesi Tengah	77,43	67,18	P-4
158 Prov. Sulawesi Selatan	62,00	65,51	P-4
159 Prov. Kepulauan Riau	80,21	50,18	P-3
160 Prov. Bali	74,66	84,12	P-5
161 Prov. Jawa Tengah	80,98	69,98	P-4
162 Prov. Riau	73,79	74,00	P-4
163 Prov. Bengkulu	83,37	80,64	P-5
164 Prov. DKI Jakarta	67,70	70,47	P-4
165 Prov. Kalimantan Timur	88,47	80,95	P-5
166 Prov. Sulawesi Barat	65,00	66,29	P-4
167 Prov. Sumatera Utara	83,92	79,07	P-4
168 Prov. Jambi	70,43	70,07	P-4
169 Prov. Sumatera Selatan	81,31	69,59	P-4
170 Prov. Banten	84,20	70,47	P-4
171 Prov. DI Yogyakarta	69,95	71,78	P-4
172 Prov. Jawa Timur	73,88	62,88	P-4
173 Prov. Lampung	71,32	59,89	P-3
174 Prov. Kalimantan Selatan	82,30	77,18	P-4
175 Pemerintah Kota Sabang	77,37	71,80	P-4
176 Pemerintah Kota Langsa	73,03	73,03	P-4
177 Pemerintah Kota Lhokseumawe	68,33	69,60	P-4
178 Pemerintah Kota Subulussalam	39,90	54,65	P-3
179 Pemerintah Kota Tebing Tinggi	78,96	67,96	P-4
180 Pemerintah Kota Pangkal Pinang	72,25	72,25	P-4
181 Pemerintah Kota Bengkulu	82,06	81,60	P-5
182 Pemerintah Kota Metro	76,32	76,32	P-4
183 Pemerintah Kota Bandar Lampung	92,88	46,05	P-3
184 Pemerintah Kota Bandung	84,87	65,12	P-4
185 Pemerintah Kota Bogor	87,00	72,79	P-4
186 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	70,90	70,90	P-4
187 Pemerintah Kota Bekasi	70,09	70,09	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
188 Pemerintah Kota Depok	72,79	72,79	P-4
189 Pemerintah Kota Tasikmalaya	77,19	77,19	P-4
190 Pemerintah Kota Banjar	77,17	77,17	P-4
191 Pemerintah Kota Tegal	76,52	65,52	P-4
192 Pemerintah Kota Serang	87,10	76,10	P-4
193 Pemerintah Kota Mataram	75,36	64,36	P-4
194 Pemerintah Kota Jambi	74,37	63,37	P-4
195 Pemerintah Kota Kediri	74,20	63,20	P-4
196 Pemerintah Kota Malang	71,49	60,49	P-4
197 Pemerintah Kota Tangerang	71,14	60,14	P-4
198 Pemerintah Kota Padang	70,62	59,62	P-3
199 Pemerintah Kota Madiun	42,29	42,29	P-3
200 Pemerintah Kota Pontianak	82,00	66,60	P-4
201 Pemerintah Kota Singkawang	77,88	77,88	P-4
202 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	70,63	70,63	P-4
203 Pemerintah Kota Palangka Raya	77,99	77,99	P-4
204 Pemerintah Kota Cilegon	68,93	57,93	P-3
205 Pemerintah Kota Palembang	68,24	57,24	P-3
206 Pemerintah Kota Samarinda	79,28	70,36	P-4
207 Pemerintah Kota Bontang	74,96	71,29	P-4
208 Pemerintah Kota Bitung	75,00	75,00	P-4
209 Pemerintah Kota Tomohon	38,00	38,00	P-2
210 Pemerintah Kota Makassar	69,00	69,00	P-4
211 Pemerintah Kota Parepare	73,33	73,33	P-4
212 Pemerintah Kota Denpasar	80,80	81,80	P-5
213 Pemerintah Kota Pasuruan	67,71	56,71	P-3
214 Pemerintah Kota Prabumulih	66,06	55,06	P-3
215 Pemerintah Kota Lubuk Linggau	63,00	52,00	P-3
216 Pemerintah Kab. Pidie	85,92	82,01	P-5
217 Pemerintah Kab. Aceh Selatan	82,25	80,04	P-5
218 Pemerintah Kab. Aceh Barat	83,04	81,64	P-5
219 Pemerintah Kab. Aceh Tengah	73,91	70,98	P-4
220 Pemerintah Kab. Bireuen	78,90	76,54	P-4
221 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	70,83	68,60	P-4
222 Pemerintah Kab. Gayo Lues	73,24	70,23	P-4
223 Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	62,39	64,60	P-4
224 Pemerintah Kab. Pidie Jaya	79,83	76,55	P-4
225 Pemerintah Kab. Banjar	80,94	69,94	P-4
226 Pemerintah Kab. Pandeglang	80,77	69,77	P-4
227 Pemerintah Kab. Batang Hari	80,63	69,63	P-4
228 Pemerintah Kab. Bengkalis	76,35	76,35	P-4
229 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	71,52	70,54	P-4
230 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	70,00	69,19	P-4
231 Pemerintah Kab. Rokan Hilir	73,64	68,83	P-4
232 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	72,25	70,98	P-4
233 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	74,36	70,56	P-4
234 Pemerintah Kab. Malang	80,00	69,00	P-4
235 Pemerintah Kab. Natuna	79,46	68,46	P-4
236 Pemerintah Kab. Sarolangun	57,00	57,00	P-3
237 Pemerintah Kab. Klaten	78,45	67,45	P-4
238 Pemerintah Kab. Bantul	78,30	67,30	P-4
239 Pemerintah Kab. Muara Enim	77,78	66,78	P-4
240 Pemerintah Kab. Sragen	77,47	66,47	P-4
241 Pemerintah Kab. Empat Lawang	59,51	59,51	P-3
242 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	59,51	59,51	P-3
243 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	77,14	66,14	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
244 Pemerintah Kab. Kebumen	76,79	65,79	P-4
245 Pemerintah Kab. Wonosobo	76,56	65,56	P-4
246 Pemerintah Kab. Batang	76,52	65,52	P-4
247 Pemerintah Kab. Bangka	62,00	62,00	P-4
248 Pemerintah Kab. Belitung	67,57	67,57	P-4
249 Pemerintah Kab. Bangka Barat	64,23	64,23	P-4
250 Pemerintah Kab. Bangka Tengah	72,37	72,37	P-4
251 Pemerintah Kab. Bangka Selatan	71,39	71,39	P-4
252 Pemerintah Kab. Belitung Timur	77,71	77,71	P-4
253 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	81,09	81,91	P-5
254 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	80,60	82,93	P-5
255 Pemerintah Kab. Rejang Lebong	77,43	71,81	P-4
256 Pemerintah Kab. Kaur	94,47	76,13	P-4
257 Pemerintah Kab. Seluma	75,77	70,35	P-4
258 Pemerintah Kab. Mukomuko	69,00	68,06	P-4
259 Pemerintah Kab. Kepahiang	81,34	80,34	P-5
260 Pemerintah Kab. Lampung Selatan	65,81	65,81	P-4
261 Pemerintah Kab. Lampung Tengah	67,87	67,87	P-4
262 Pemerintah Kab. Lampung Barat	68,92	68,92	P-4
263 Pemerintah Kab. Tanggamus	64,95	64,95	P-4
264 Pemerintah Kab. Way Kanan	67,10	67,10	P-4
265 Pemerintah Kab. Lampung Timur	67,83	67,83	P-4
266 Pemerintah Kab. Pesawaran	71,28	71,28	P-4
267 Pemerintah Kab. Mesuji	69,65	69,65	P-4
268 Pemerintah Kab. Pesisir Barat	67,92	67,92	P-4
269 Pemerintah Kab. Bogor	83,00	83,00	P-5
270 Pemerintah Kab. Sukabumi	80,80	65,48	P-4
271 Pemerintah Kab. Cianjur	65,65	65,65	P-4
272 Pemerintah Kab. Bekasi	79,55	79,55	P-4
273 Pemerintah Kab. Karawang	80,21	80,21	P-5
274 Pemerintah Kab. Purwakarta	70,23	70,23	P-4
275 Pemerintah Kab. Subang	64,10	64,10	P-4
276 Pemerintah Kab. Bandung	70,16	70,16	P-4
277 Pemerintah Kab. Sumedang	68,77	68,77	P-4
278 Pemerintah Kab. Garut	76,72	76,72	P-4
279 Pemerintah Kab. Ciamis	75,13	75,13	P-4
280 Pemerintah Kab. Cirebon	80,14	70,28	P-4
281 Pemerintah Kab. Indramayu	68,07	68,07	P-4
282 Pemerintah Kab. Majalengka	82,21	82,21	P-5
283 Pemerintah Kab. Pangandaran	78,32	78,32	P-4
284 Pemerintah Kab. Gresik	76,44	65,44	P-4
285 Pemerintah Kab. Lombok Utara	76,18	65,18	P-4
286 Pemerintah Kab. Magetan	76,14	65,14	P-4
287 Pemerintah Kab. Kudus	76,02	65,02	P-4
288 Pemerintah Kab. Barito Kuala	75,89	64,89	P-4
289 Pemerintah Kab. Rembang	75,68	64,68	P-4
290 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	75,60	64,60	P-4
291 Pemerintah Kab. Tabalong	75,31	64,31	P-4
292 Pemerintah Kab. Sumenep	75,28	64,28	P-4
293 Pemerintah Kab. Karanganyar	75,22	64,22	P-4
294 Pemerintah Kab. Jember	75,00	64,00	P-4
295 Pemerintah Kab. Tegal	74,88	63,88	P-4
296 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	74,60	63,60	P-4
297 Pemerintah Kab. Ponorogo	74,31	63,31	P-4
298 Pemerintah Kab. Jombang	74,21	63,21	P-4
299 Pemerintah Kab. Kediri	74,20	63,20	P-4

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
300 Pemerintah Kab. Merangin	74,12	63,12	P-4
301 Pemerintah Kab. Temanggung	60,77	60,77	P-4
302 Pemerintah Kab. Konawe Selatan	72,04	61,04	P-4
303 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	71,56	60,56	P-4
304 Pemerintah Kab. Pematang	66,01	70,42	P-4
305 Pemerintah Kab. Pekalongan	71,15	60,15	P-4
306 Pemerintah Kab. Wonogiri	85,21	83,67	P-5
307 Pemerintah Kab. Pasuruan	70,75	59,75	P-3
308 Pemerintah Kab. Sleman	70,64	59,64	P-3
309 Pemerintah Kab. Probolinggo	70,61	59,61	P-3
310 Pemerintah Kab. Pacitan	70,22	59,22	P-3
311 Pemerintah Kab. Purworejo	69,80	58,80	P-3
312 Pemerintah Kab. Sambas	74,00	74,00	P-4
313 Pemerintah Kab. Sanggau	76,28	76,28	P-4
314 Pemerintah Kab. Sintang	85,39	85,39	P-5
315 Pemerintah Kab. Mempawah	80,83	62,21	P-4
316 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	68,68	68,68	P-4
317 Pemerintah Kab. Ketapang	74,29	74,29	P-4
318 Pemerintah Kab. Bengkayang	73,43	73,43	P-4
319 Pemerintah Kab. Landak	77,02	77,02	P-4
320 Pemerintah Kab. Melawi	70,41	70,41	P-4
321 Pemerintah Kab. Sekadau	69,50	69,50	P-4
322 Pemerintah Kab. Kubu Raya	78,00	78,00	P-4
323 Pemerintah Kab. Kayong Utara	69,00	69,00	P-4
324 Pemerintah Kab. Kapuas	74,70	74,70	P-4
325 Pemerintah Kab. Barito Utara	69,52	69,52	P-4
326 Pemerintah Kab. Barito Selatan	71,73	71,73	P-4
327 Pemerintah Kota Sukabumi	69,91	69,91	P-4
328 Pemerintah Kab. Pulang Pisau	74,61	74,61	P-4
329 Pemerintah Kab. Gunung Mas	78,21	78,21	P-4
330 Pemerintah Kab. Lamandau	76,31	76,31	P-4
331 Pemerintah Kab. Sukamara	69,92	69,92	P-4
332 Pemerintah Kab. Murung Raya	73,60	73,60	P-4
333 Pemerintah Kab. Katingan	78,33	78,33	P-4
334 Pemerintah Kab. Seruyan	74,64	74,64	P-4
335 Pemerintah Kab. Barito Timur	75,36	75,36	P-4
336 Pemerintah Kab. Lombok Tengah	69,00	58,00	P-3
337 Pemerintah Kab. Sumbawa	69,00	58,00	P-3
338 Pemerintah Kab. Mandailing Natal	68,76	57,76	P-3
339 Pemkab Buru Selatan	77,18	67,93	P-4
340 Pemerintah Kab. Semarang	68,34	57,34	P-3
341 Pemerintah Kab. Lumajang	68,33	57,33	P-3
342 Pemerintah Kab. Boalemo	68,29	57,29	P-3
343 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	67,46	66,90	P-4
344 Pemerintah Kab. Paser	80,39	80,04	P-5
345 Pemerintah Kab. Berau	67,14	65,38	P-4
346 Pemerintah Kab. Minahasa	68,71	68,71	P-4
347 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	69,66	69,66	P-4
348 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	100,00	72,40	P-4
349 Pemerintah Kab. Minahasa Utara	74,40	74,40	P-4
350 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	78,00	78,00	P-4
351 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	65,88	65,88	P-4
352 Pemerintah Kab. Poso	71,39	71,39	P-4
353 Pemerintah Kab. Tolitoli	70,02	70,02	P-4
354 Pemerintah Kab. Banggai	70,17	70,17	P-4
355 Pemerintah Kab. Morowali	88,82	88,82	P-5

Pemerintah Daerah	Evaluasi Kelembagaan Mandiri	Hasil Verifikasi	Indeks Komposit
356 Pemerintah Kab. Sigi	68,36	68,36	P-4
357 Pemkab Maluku Barat Daya	83,38	83,23	P-5
358 Pemerintah Kab. Pinrang	87,86	70,50	P-4
359 Pemerintah Kab. Wajo	70,65	70,65	P-4
360 Pemerintah Kab. Bone	69,00	69,00	P-4
361 Pemerintah Kab. Tana Toraja	64,00	64,00	P-4
362 Pemerintah Kab. Maros	70,51	70,51	P-4
363 Pemerintah Kab. Sinjai	81,85	64,21	P-4
364 Pemerintah Kab. Bulukumba	78,14	78,14	P-4
365 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	69,00	69,00	P-4
366 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	67,00	67,00	P-4
367 Pemerintah Kab. Soppeng	71,00	71,00	P-4
368 Pemerintah Kab. Luwu Utara	76,68	76,68	P-4



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 663 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706); dan
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,08	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,00	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,46	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,92	Sangat Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,98	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,64	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,63	Sangat Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	Memuaskan
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4,46	Memuaskan
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4,10	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	4,06	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	4,19	Sangat Baik
3	Badan Pusat Statistik	4,53	Memuaskan
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,88	Sangat Baik
5	Badan Informasi Geospasial	3,88	Sangat Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,51	Sangat Baik
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,31	Memuaskan
8	Perpustakaan Nasional RI	4,12	Sangat Baik
9	Badan Standardisasi Nasional	3,81	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,91	Sangat Baik
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,53	Memuaskan
12	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
13	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,98	Sangat Baik
14	Badan Narkotika Nasional	3,38	Baik
15	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3,14	Baik
16	Badan Keamanan Laut	3,57	Sangat Baik
17	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,63	Sangat Baik
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,95	Sangat Baik
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	3,09	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
20	Badan Pangan Nasional	3,91	Sangat Baik
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,38	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	4,20	Memuaskan
2	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,47	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,90	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
4	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
8	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset Inovasi Nasional	4,19	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,07	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	3,21	Baik
2	Radio Republik Indonesia	3,37	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	3,37	Baik
2	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	3,53	Sangat Baik
3	Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3,32	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,36	Memuaskan
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,66	Memuaskan
6	Sekretariat Jenderal Ombudsman	3,93	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3,75	Sangat Baik
8	Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,82	Baik
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,47	Baik
10	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	2,65	Baik
11	Sekretariat Komisi Kejaksaan	1,67	Kurang
12	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	2,22	Cukup
13	Dewan Pertimbangan Presiden	2,63	Baik
14	Sekretariat Dewan Pers	2,58	Cukup
15	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,39	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,57	Sangat Baik
17	Badan Pengusahaan Sabang	2,42	Cukup
18	Badan Pengusahaan Batam	3,82	Sangat Baik
19	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,54	Sangat Baik
20	Lembaga Sensor Film	2,75	Baik
21	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	2,36	Cukup
22	Kantor Staf Presiden	3,93	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,64	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	2,39	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,25	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,44	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	2,48	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	2,29	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bireuen	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	2,28	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,86	Baik
13	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,69	Baik
14	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,86	Baik
15	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,94	Baik
16	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,67	Baik
17	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,66	Baik
18	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,61	Baik
19	Pemerintah Kota Sabang	3,02	Baik
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,70	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Langsa	1,95	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,80	Baik
23	Pemerintah Kota Subulussalam	2,48	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
11	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
16	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
17	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik
18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
19	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,17	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
21	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
22	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
24	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Cukup
25	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26	Pemerintah Kota Medan	3,67	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
28	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
29	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
30	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
31	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
32	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,66	Baik
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,25	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,61	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,60	Baik
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3,04	Baik
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3,25	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,56	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,23	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,81	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	3,00	Baik
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3,28	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	3,16	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,41	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,75	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,96	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	3,44	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,55	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	2,92	Baik
4	Pemerintah Kab. Bungo	2,71	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Merangin	3,20	Baik
6	Pemerintah Kab. Kerinci	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	3,10	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,62	Baik
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,83	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,32	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,33	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71	Baik
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	2,40	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	3,51	Sangat Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,92	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	3,28	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,87	Baik
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,24	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,42	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,26	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,84	Baik
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,63	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3,08	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	3,44	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,52	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	3,49	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,49	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	3,05	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,99	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,94	Baik
15	Pemerintah Kota Metro	3,34	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	4,46	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bogor	4,10	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,95	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,40	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,94	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3,38	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,98	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Garut	3,89	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,76	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,61	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,57	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemasang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,21	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	3,54	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Malang	3,74	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	3,88	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,97	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	3,39	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,84	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,22	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,77	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Ngawi	3,61	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
24	Pemerintah Kab. Magetan	2,92	Baik
25	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,07	Baik
26	Pemerintah Kab. Pacitan	3,50	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Bojonegoro	4,14	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Tuban	4,24	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Lamongan	4,18	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Madiun	4,31	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Surabaya	4,54	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Mojokerto	4,32	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Malang	4,24	Memuaskan
34	Pemerintah Kota Pasuruan	4,07	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Probolinggo	4,04	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Blitar	4,11	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Kediri	3,89	Sangat Baik
38	Pemerintah Kota Madiun	4,57	Memuaskan
39	Pemerintah Kota Batu	3,57	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,91	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	3,29	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,73	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,82	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,06	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	3,12	Baik
9	Pemerintah Kab. Landak	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,47	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,13	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,38	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,68	Baik
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,49	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,20	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,22	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,87	Baik
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	3,16	Baik
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,74	Baik
9	Pemerintah Kab. Lamandau	3,15	Baik
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,75	Baik
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,63	Baik
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,25	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	2,50	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	2,82	Baik
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,75	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	3,09	Baik
3	Pemerintah Kab. Paser	3,27	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,02	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,87	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	2,25	Cukup
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,85	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,96	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	3,39	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
6	Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Minahasa	2,23	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,34	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,46	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,66	Baik
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,88	Baik
13	Pemerintah Kota Manado	3,93	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	3,31	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,03	Baik
16	Pemerintah Kota KotaMobagu	2,93	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4,13	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,52	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	3,00	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,89	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,82	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,49	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,59	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	3,19	Baik
7	Pemerintah Kab. Morowali	3,25	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,55	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,72	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	3,06	Baik
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,29	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	2,11	Cukup
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,58	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,94	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	3,49	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	3,63	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,77	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	3,18	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Maros	3,15	Baik
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,60	Baik
9	Pemerintah Kab. Sinjai	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,56	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,64	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,10	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,57	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,80	Baik
15	Pemerintah Kab. Barru	2,79	Baik
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	3,04	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,98	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
19	Pemerintah Kab. Enrekang	3,20	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,26	Baik
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,16	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,31	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	4,02	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,12	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Konawe	2,92	Baik
3	Pemerintah Kab. Buton	2,26	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,35	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,68	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	3,68	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	2,55	Cukup
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,19	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,85	Baik
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,12	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	2,25	Cukup
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,63	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,82	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	3,23	Baik
18	Pemerintah Kota Baubau	3,09	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3,70	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	2,01	Cukup
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,88	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	3,04	Baik
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,30	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,69	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,77	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Gianyar	3,49	Baik
5	Pemerintah Kab. Karangasem	2,57	Cukup
6	Pemerintah Kab. Bangli	2,71	Baik
7	Pemerintah Kab. Badung	3,87	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tabanan	3,54	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Klungkung	3,14	Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,96	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,89	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	2,48	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,43	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,83	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,19	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,10	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	2,58	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	2,17	Cukup
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,90	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,56	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	3,12	Baik
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,42	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	3,35	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,47	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	2,03	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	2,19	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,84	Cukup
21	Pemerintah Kab. Malaka	2,17	Cukup
22	Pemerintah Kota Kupang	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,63	Baik
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	2,24	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,96	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,31	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,41	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,90	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	2,41	Cukup
8	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,81	Cukup
9	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	2,05	Cukup
10	Pemerintah Kota Ambon	2,64	Baik
11	Pemerintah Kota Tual	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	2,06	Cukup
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,43	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,73	Baik
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,38	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,97	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	2,09	Cukup
10	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kota Ternate	1,89	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	2,03	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,82	Baik

3	Pemerintah Kab. Keerom	1,14	Kurang
4	Pemerintah Kab. Sarmi	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Supiori	1,48	Kurang
6	Pemerintah Kota Jayapura	2,35	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,61	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Asmat	1,03	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mimika	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Puncak	1,62	Kurang
5	Pemerintah Kab. Dogiyai	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	2,43	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,09	Kurang
4	Pemerintah Kab. Nduga	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tolikara	1,47	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	2,39	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,49	Cukup
3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,33	Kurang
4	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional

Kementerian/Lembaga

No.	Instansi	IPP	Kategori
1	TNI	4,67	A
2	Televisi Republik Indonesia	3,25	B-
3	Sekretariat Kabinet	4,58	A
4	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	3,93	B
5	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI	4,74	A
6	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	4,60	A
7	Perpustakaan Nasional	4,28	A-
8	Ombudsman RI	4,16	A-
9	Mahkamah Konstitusi	4,62	A
10	Mahkamah Agung	4,58	A
11	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4,51	A
12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	4,09	A-
13	Lembaga Ketahanan Nasional	3,87	B
14	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4,01	A-
15	Lembaga Administrasi Negara	4,69	A
16	Komisi Yudisial	3,56	B

17	Komisi Pemilihan Umum	4,79	A
18	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,43	A-
19	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4,26	A-
20	Kepolisian RI	4,61	A
21	Kementerian Sosial	4,46	A-
22	Kementerian Sekretariat Negara	4,43	A-
23	Kementerian PPN / Bappenas	3,44	B-
24	Kementerian Pertanian	4,69	A
25	Kementerian Pertahanan	4,53	A
26	Kementerian Perindustrian	4,51	A
27	Kementerian Perhubungan	4,74	A
28	Kementerian Perdagangan	4,59	A
29	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,51	A
30	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,28	A-
31	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4,31	A-
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,94	B
33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,72	A
34	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,67	A
35	Kementerian Luar Negeri	4,53	A
36	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,32	A-
37	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,62	A

38	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	4,29	A-
39	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,48	A-
40	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4,59	A
41	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	4,52	A
42	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,70	A
43	Kementerian Keuangan	4,91	A
44	Kementerian Ketenagakerjaan	4,51	A
45	Kementerian Kesehatan	4,70	A
46	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4,80	A
47	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	4,52	A
48	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,72	A
49	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4,58	A
50	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4,23	A-
51	Kementerian Dalam Negeri	4,61	A
52	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,33	A-
53	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	4,77	A
54	Kementerian Agama	4,86	A
55	Kejaksaan Agung	4,43	A-
56	Dewan Ketahanan Nasional	4,14	A-

57	Badan Standarisasi Nasional	4,67	A
58	Badan Siber dan Sandi Negara	4,55	A
59	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4,69	A
60	Badan Pusat Statistik	4,91	A
61	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	4,52	A
62	Badan Pengusahaan Batam	3,56	B
63	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	2,32	C-
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,41	A-
65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4,16	A-
66	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,91	A
67	Badan Pemeriksa Keuangan	3,30	B-
68	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3,60	B
69	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4,52	A
70	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	4,57	A
71	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4,48	A-
72	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4,22	A-
73	Badan Narkotika Nasional	4,51	A
74	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	4,67	A
75	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4,35	A-
76	Badan Kepegawaian Negara	4,78	A
77	Badan Keamanan Laut	4,35	A-
78	Sekretariat Jenderal DPD RI	4,32	A-
79	Badan Intelijen Negara	4,63	A

80	Badan Informasi Geospasial	4,51	A
81	Arsip Nasional Republik Indonesia	4,21	A-
82	KASN	N/A	N/A
IPP KEMENTERIAN DAN LEMBAGA		4,39	A-

Provinsi

No.	Instansi	Samsat	Dinsos	RSUD	IPP	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,84	4,63	4,81	4,76	A
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,54	4,75	4,59	4,63	A
3	Pemerintah Provinsi DIY	4,59	4,62	4,64	4,62	A
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4,76	4,37	4,67	4,60	A
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4,54	4,52	4,61	4,56	A
6	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,52	4,46	4,62	4,53	A
7	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,37	4,63	4,59	4,53	A
8	Pemerintah Provinsi Aceh	4,19	4,51	4,65	4,45	A-
9	Pemerintah Provinsi NTB	4,3	4,33	4,63	4,42	A-
10	Pemerintah Provinsi Bali	4,46	4,11	4,65	4,41	A-
11	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	4,59	4,46	3,97	4,34	A-
12	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	4,33	4,11	4,35	4,26	A-
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4,65	3,92	4,22	4,26	A-

14	Pemerintah Provinsi Kep, Bangka Belitung	3,86	4,52	4,31	4,23	A-
15	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	4,21	3,94	4,51	4,22	A-
16	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	4,37	3,72	4,52	4,20	A-
17	Pemerintah Provinsi Lampung	4,26	4,04	4,51	4,27	A-
18	Pemerintah Provinsi Riau	4,3	3,79	4,28	4,12	A-
19	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,86	3,96	4,54	4,12	A-
20	Pemerintah Provinsi Gorontalo	3,79	4,12	4,2	4,04	A-
21	Pemerintah Provinsi Bengkulu	4,45	3,54	3,82	3,94	B
22	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,9	4,07	3,72	3,90	B
23	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,93	3,08	4,24	3,75	B
24	Pemerintah Provinsi Banten	3,35	3,63	4,22	3,73	B
25	Pemerintah Provinsi Jambi	3,6	3,24	4,21	3,68	B
26	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,59	2,83	4,49	3,64	B
27	Pemerintah Provinsi NTT	3,28	3,33	4,07	3,56	B
28	Pemerintah Provinsi Papua Barat*	3,39		3,25	3,32	B-
29	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,81	3,23	3,92	3,32	B-
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,25	2,32	3,91	2,83	C
31	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,22	2,49	3,7	2,80	C

32	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,27	2,71	3,03	2,67	C
33	Pemerintah Provinsi Maluku	1,36	2,85	2,34	2,18	C-
34	Pemerintah Provinsi Papua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IPP PROVINSI					3,97	B

Kota

No	Instansi Pemerintah	Administrasi	Barang	Jasa	IPP	Kategori
1	Kota Surakarta	4,79	4,77	4,51	4,69	A
2	Kota Bandung	4,77	4,83	4,45	4,68	A
3	Kota Depok	4,73	4,64	4,63	4,67	A
4	Kota Madiun	4,64	4,63	4,73	4,67	A
5	Kota Denpasar	4,74	4,52	4,73	4,66	A
6	Kota Palembang	4,64	4,45	4,89	4,66	A
7	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,6	4,61	4,76	4,66	A
8	Kota Bogor	4,62	4,62	4,72	4,65	A
9	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,69	4,59	4,67	4,65	A
10	Kota Salatiga	4,64	4,71	4,51	4,62	A
11	Kota Sukabumi	4,59	4,6	4,66	4,62	A
12	Kota Magelang	4,43	4,73	4,68	4,61	A
13	Kota Metro	4,79	4,32	4,70	4,60	A
14	Kota Kotamobagu	4,62	4,42	4,74	4,59	A

15	Kota Pekalongan	4,59	4,42	4,75	4,59	A
16	Kota Bekasi	4,63	4,56	4,55	4,58	A
17	Kota Cimahi	4,62	4,76	4,36	4,58	A
18	Kota Surabaya	4,63	4,4	4,69	4,57	A
19	Kota Malang	4,73	4,55	4,44	4,57	A
20	Kota Banjarmasin	4,55	4,58	4,49	4,54	A
21	Kota Yogyakarta	4,75	4,02	4,83	4,53	A
22	Kota Pasuruan	4,38	4,57	4,63	4,53	A
23	Kota Banjar	4,45	4,56	4,55	4,52	A
24	Kota Blitar	4,68	4,6	4,28	4,52	A
25	Kota Medan	4,69	4,33	4,50	4,51	A
26	Kota Banjarbaru	4,67	4,2	4,64	4,50	A-
27	Kota Payakumbuh	4,51	4,51	4,48	4,50	A-
28	Kota Tomohon	4,55	4,37	4,57	4,50	A-
29	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,41	4,42	4,64	4,49	A-
30	Kota Tegal	4,52	4,26	4,68	4,49	A-
31	Kota Mataram	4,46	4,42	4,55	4,48	A-
32	Kota Bitung	4,52	4,39	4,51	4,47	A-
33	Kota Manado	4,46	4,18	4,74	4,46	A-
34	Kota Singkawang	4,4	4,46	4,51	4,46	A-
35	Kota Prabumulih	4,45	4,43	4,49	4,46	A-
36	Kota Lubuklinggau	4,52	4,25	4,55	4,44	A-

37	Kota Semarang	4,39	4,17	4,74	4,43	A-
38	Kota Tanjungpinang	4,48	4,21	4,50	4,40	A-
39	Kota Gunungsitoli	4,13	4,65	N/A	4,39	A-
40	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,38	4,41	4,38	4,39	A-
41	Kota Banda Aceh	4,73	3,93	4,48	4,38	A-
42	Kota Tangerang	4,26	4,37	4,42	4,35	A-
43	Kota Pontianak	4,46	4,09	4,49	4,35	A-
44	Kota Bandar Lampung	4,61	3,9	4,47	4,33	A-
45	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,48	4,56	3,93	4,32	A-
46	Kota Pariaman	4,52	4,22	4,21	4,32	A-
47	Kota Tasikmalaya	4,25	4,1	4,55	4,30	A-
48	Kota Bontang	4,27	4,19	4,39	4,28	A-
49	Kota Samarinda	4,54	3,71	4,52	4,26	A-
50	Kota Tangerang Selatan	4,19	4,17	4,39	4,25	A-
51	Kota Pekanbaru	4,79	3,79	4,17	4,25	A-
52	Kota Cilegon	4,35	4,21	4,12	4,23	A-
53	Kota Kediri	4,35	3,91	4,35	4,20	A-
54	Kota Batam	4	4,22	4,37	4,20	A-
55	Kota Mojokerto	4,54	3,8	4,24	4,19	A-
56	Kota Balikpapan	4,43	4,23	3,91	4,19	A-
57	Kota Padang Panjang	4,56	3,51	4,45	4,17	A-
58	Kota Probolinggo	4,23	3,96	4,26	4,15	A-

59	Kota Tebing Tinggi	4,55	3,95	3,95	4,15	A-
60	Kota Pangkalpinang	4,36	4	4,08	4,15	A-
61	Kota Kupang	4,29	3,8	4,35	4,15	A-
62	Kota Bukittinggi	4,33	3,62	4,44	4,13	A-
63	Kota Tarakan	4,06	3,76	4,43	4,08	A-
64	Kota Solok	4,26	3,9	N/A	4,08	A-
65	Kota Binjai	4,2	3,71	4,11	4,01	A-
66	Kota Ambon	3,84	4,16	N/A	4,00	B
67	Kota Serang	4,15	4,08	3,73	3,99	B
68	Kota Pagar Alam	4,12	3,72	4,12	3,99	B
69	Kota Cirebon	4,4	4,23	3,27	3,97	B
70	Kota Jambi	4,55	3,89	3,45	3,96	B
71	Kota Bengkulu	4,34	3,04	4,48	3,95	B
72	Kota Lhokseumawe	4,07	3,8	NA	3,94	B
73	Kota Langsa	3,76	3,56	4,26	3,86	B
74	Kota Padangsidempuan	3,93	3,91	3,73	3,86	B
75	Kota Dumai	3,85	3,81	3,85	3,84	B
76	Kota Subulussalam	3,67	3,67	4,12	3,82	B
77	Kota Palu	4,33	3,08	3,92	3,78	B
78	Kota Sabang	4,37	3,45	3,50	3,77	B
79	Kota Batu	4,36	3,16	N/A	3,76	B
80	Kota Sibolga	4	3,04	4,21	3,75	B
81	Kota Palangkaraya	3,92	4,44	2,76	3,71	B
82	Kota Bima	3,72	3,77	3,52	3,67	B

83	Kota Padang	3,67	2,98	3,68	3,44	B-
84	Kota Kendari	3,9	2,87	3,55	3,44	B-
85	Kota Baubau	3,48	2,9	3,56	3,31	B-
86	Kota Makassar	3,49	3,1	3,03	3,21	B-
87	Kota Sawahlunto	3,77	2,67	3,09	3,18	B-
88	Kota Pare-Pare	4,39	2,88	2,21	3,16	B-
89	Kota Tanjungbalai	3,47	3,26	2,69	3,14	B-
90	Kota Gorontalo	2,64	2,99	3,76	3,13	B-
91	Kota Sorong	2,58	3,06	3,06	2,90	C
92	Kota Pematang Siantar	3,01	2,85	2,70	2,85	C
93	Kota Tidore	3,03	2,5	2,78	2,77	C
94	Kota Jayapura	3,55	1,21	2,51	2,42	C-
95	Kota Ternate	2,93	N/A	1,30	2,12	C-
96	Kota Tual	2,69	1,38	1,84	1,97	D
97	Kota Palopo	2,17	N/A	1,10	1,64	D
98	Kota Sungaipenuh	1,2	2,04	0,72	1,32	E
Rata-rata					4,05	A-

Kabupaten

No	Instansi Pemerintah	Administrasi	Barang	Jasa	IPP	Kategori
1	Kabupaten Malaka	N/A	N/A	N/A		N/A
2	Kabupaten Sumba Barat	N/A	N/A	N/A		N/A
3	Kabupaten Seram Bagian Barat	N/A	N/A	N/A		N/A
4	Kabupaten Supiori	N/A	N/A	N/A		N/A
5	Kabupaten Deiyai	N/A	N/A	N/A		N/A

6	Kabupaten Mimika	N/A	N/A	N/A		N/A
7	Kabupaten Paniai	N/A	N/A	N/A		N/A
8	Kabupaten Puncak Jaya	N/A	N/A	N/A		N/A
9	Kabupaten Keerom	N/A	N/A	N/A		N/A
10	Kabupaten Pegunungan Bintang	N/A	N/A	N/A		N/A
11	Kabupaten Tolikara	N/A	N/A	N/A		N/A
12	Kabupaten Waropen	N/A	N/A	N/A		N/A
13	Kabupaten Mamberamo Raya	N/A	N/A	N/A		N/A
14	Kabupaten Mamberamo Tengah	N/A	N/A	N/A		N/A
15	Kabupaten Yalimo	N/A	N/A	N/A		N/A
16	Kabupaten Lanny Jaya	N/A	N/A	N/A		N/A
17	Kabupaten Nduga	N/A	N/A	N/A		N/A
18	Kabupaten Puncak	N/A	N/A	N/A		N/A
19	Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A	N/A		N/A
20	Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A	N/A		N/A
21	Kabupaten Teluk Bintuni	N/A	N/A	N/A		N/A
22	Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A	N/A		N/A
23	Kabupaten Tambrauw	N/A	N/A	N/A		N/A
24	Kabupaten Maybrat	N/A	N/A	N/A		N/A

25	Kabupaten Manokwari Selatan	N/A	N/A	N/A		N/A
26	Kabupaten Pegunungan Arfak	N/A	N/A	N/A		N/A
27	Kabupaten Boven Digoel	N/A	N/A	N/A		N/A
28	Kabupaten Sarmi	N/A	N/A	N/A		N/A
29	Kabupaten Fak-fak	N/A	N/A	N/A		N/A
30	Kabupaten Cilacap	4,68	4,64	4,64	4,65	A
31	Kabupaten Sidoarjo	4,66	4,54	4,75	4,65	A
32	Kabupaten Sleman	4,63	4,59	4,66	4,63	A
33	Kabupaten Jember	4,51	4,59	4,75	4,62	A
34	Kabupaten Banyumas	4,61	4,51	4,71	4,61	A
35	Kabupaten Kudus	4,63	4,56	4,64	4,61	A
36	Kabupaten Sampang	4,79	4,33	4,69	4,60	A
37	Kabupaten Madiun	4,53	4,52	4,75	4,60	A
38	Kabupaten Jombang	4,52	4,60	4,67	4,60	A
39	Kabupaten Sukoharjo	4,58	4,43	4,78	4,60	A
40	Kabupaten Banyuwangi	4,54	4,52	4,72	4,59	A
41	Kabupaten Kebumen	4,54	4,56	4,68	4,59	A
42	Kabupaten Sumedang	4,62	4,56	4,57	4,58	A
43	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,52	4,52	4,70	4,58	A

44	Kabupaten Purwakarta	4,62	4,65	4,47	4,58	A
45	Kabupaten Wonogiri	4,68	4,44	4,61	4,58	A
46	Kabupaten Jepara	4,67	4,49	4,55	4,57	A
47	Kabupaten Nganjuk	4,62	4,53	4,56	4,57	A
48	Kabupaten Magetan	4,57	4,55	4,58	4,57	A
49	Kabupaten Musi Banyuasin	4,56	4,52	4,62	4,57	A
50	Kabupaten Banjarnegara	4,53	4,67	4,49	4,56	A
51	Kabupaten Garut	4,73	4,66	4,28	4,56	A
52	Kabupaten Muara Enim	4,51	4,51	4,65	4,56	A
53	Kabupaten Kulonprogo	4,59	4,30	4,77	4,55	A
54	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,59	4,41	4,65	4,55	A
55	Kabupaten Kediri	4,64	4,42	4,59	4,55	A
56	Kabupaten Pematang	4,57	4,50	4,55	4,54	A
57	Kabupaten Tapin	4,69	4,42	4,51	4,54	A
58	Kabupaten Minahasa Selatan	4,60	4,46	4,55	4,54	A
59	Kabupaten Subang	4,58	4,27	4,75	4,53	A
60	Kabupaten Deli Serdang	4,47	4,47	4,65	4,53	A
61	Kabupaten Kuantan Singingi	4,44	4,56	4,59	4,53	A
62	Kabupaten Wonosobo	4,42	4,48	4,67	4,52	A
63	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,51	4,35	4,70	4,52	A

64	Kabupaten Pasuruan	4,57	4,38	4,60	4,52	A
65	Kabupaten Ogan Komerling Ilir	4,57	4,57	4,40	4,51	A
66	Kabupaten Boyolali	4,45	4,51	4,57	4,51	A
67	Kabupaten Musi Rawas	4,60	4,41	4,51	4,51	A
68	Kabupaten Semarang	4,63	4,30	4,56	4,50	A-
69	Kabupaten Tulang Bawang	4,56	4,38	4,55	4,50	A-
70	Kabupaten Banjar	4,51	4,32	4,65	4,49	A-
71	Kabupaten Tabalong	4,59	4,44	4,44	4,49	A-
72	Kabupaten Badung	4,64	4,44	4,39	4,49	A-
73	Kabupaten Sukabumi	4,52	4,19	4,75	4,49	A-
74	Kabupaten Demak	4,60	4,18	4,64	4,47	A-
75	Kabupaten Rembang	4,44	4,54	4,42	4,47	A-
76	Kabupaten Serdang Bedagai	4,66	4,29	4,45	4,47	A-
77	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,65	3,87	4,87	4,46	A-
78	Kabupaten Lampung Tengah	4,40	4,35	4,64	4,46	A-
79	Kabupaten Pesisir Selatan	4,47	4,53	4,39	4,46	A-
80	Kabupaten Natuna	4,48	4,45	4,45	4,46	A-
81	Kabupaten Solok	4,55	4,51	4,32	4,46	A-
82	Kabupaten Pringsewu	4,55	4,68	4,14	4,46	A-
83	Kabupaten Banyuasin	4,42	4,44	4,51	4,46	A-

84	Kabupaten Tuban	4,36	4,30	4,68	4,45	A-
85	Kabupaten Pangandaran	4,02	4,55	4,75	4,44	A-
86	Kabupaten Purbalingga	4,78	3,94	4,60	4,44	A-
87	Kabupaten Kendal	4,56	4,15	4,60	4,44	A-
88	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,48	4,27	4,56	4,44	A-
89	Kabupaten Karanganyar	4,35	4,41	4,53	4,43	A-
90	Kabupaten Lampung Utara	4,47	4,33	4,47	4,42	A-
91	Kabupaten Timor Tengah Utara	N/A	N/A	3,49	1,16	E
92	Kabupaten Blora	4,13	4,55	4,57	4,42	A-
93	Kabupaten Grobogan	4,62	4,00	4,61	4,41	A-
94	Kabupaten Indramayu	4,26	4,23	4,72	4,40	A-
95	Kabupaten Ogan Ilir	4,57	4,17	4,47	4,40	A-
96	Kabupaten Bengkalis	4,56	4,52	4,08	4,39	A-
97	Kabupaten Tasikmalaya	4,29	4,42	4,43	4,38	A-
98	Kabupaten Lamongan	4,07	4,28	4,78	4,38	A-
99	Kabupaten Way Kanan	4,38	4,08	4,66	4,37	A-
100	Kabupaten Karimun	4,42	4,39	4,30	4,37	A-
101	Kabupaten Kuningan	4,41	4,28	4,42	4,37	A-
102	Kabupaten Batang	4,49	4,12	4,49	4,37	A-
103	Kabupaten Sijunjung	4,25	4,41	4,42	4,36	A-
104	Kabupaten Bekasi	4,43	4,13	4,51	4,36	A-

105	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,47	4,20	4,39	4,35	A-
106	Kabupaten Bogor	4,44	4,10	4,52	4,35	A-
107	Kabupaten Tegal	4,14	4,22	4,68	4,35	A-
108	Kabupaten Bandung	4,51	4,24	4,28	4,34	A-
109	Kabupaten Musi Rawas Utara	4,36	4,24	4,43	4,34	A-
110	Kabupaten Langkat	4,44	4,33	4,26	4,34	A-
111	Kabupaten Brebes	4,12	4,33	4,54	4,33	A-
112	Kabupaten Lumajang	4,35	4,14	4,50	4,33	A-
113	Kabupaten Ketapang	4,48	4,11	4,39	4,33	A-
114	Kabupaten Purworejo	4,75	3,70	4,53	4,33	A-
115	Kabupaten Majalengka	4,58	4,30	4,09	4,32	A-
116	Kabupaten Indragiri Hilir	4,15	4,26	4,54	4,32	A-
117	Kabupaten Pesawaran	4,43	4,05	4,47	4,32	A-
118	Kabupaten Ponorogo	4,43	3,97	4,55	4,32	A-
119	Kabupaten Minahasa Utara	4,03	4,71	4,19	4,31	A-
120	Kabupaten Bolaang Mongondow	4,23	4,42	4,26	4,30	A-
121	Kabupaten Mojokerto	4,43	4,33	4,14	4,30	A-
122	Kabupaten Pacitan	4,23	4,00	4,66	4,30	A-
123	Kabupaten Temanggung	4,73	4,05	4,10	4,29	A-
124	Kabupaten Ciamis	4,53	4,08	4,27	4,29	A-
125	Kabupaten Aceh Tamiang	4,20	4,16	4,51	4,29	A-

126	Kabupaten Padang Pariaman	4,17	4,23	4,47	4,29	A-
127	Kabupaten Pekalongan	4,33	4,10	4,44	4,29	A-
128	Kabupaten Tulungagung	4,53	4,00	4,34	4,29	A-
129	Kabupaten Balangan	4,21	4,12	4,53	4,29	A-
130	Kabupaten Barito Kuala	4,14	4,23	4,46	4,28	A-
131	Kabupaten Tanggamus	4,35	4,32	4,15	4,27	A-
132	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,96	4,52	4,32	4,27	A-
133	Kabupaten Gunung Kidul	4,23	4,27	4,30	4,27	A-
134	Kabupaten Tanah Datar	4,53	3,86	4,40	4,26	A-
135	Kabupaten Bangkalan	3,49	4,51	4,78	4,26	A-
136	Kabupaten Karawang	4,74	3,36	4,68	4,26	A-
137	Kabupaten Sambas	4,34	3,92	4,52	4,26	A-
138	Kabupaten Aceh Singkil	4,22	4,04	4,48	4,25	A-
139	Kabupaten Cirebon	3,80	4,30	4,61	4,24	A-
140	Kabupaten Pati	4,33	4,17	4,21	4,24	A-
141	Kabupaten Tanah Laut	4,64	3,62	4,43	4,23	A-
142	Kabupaten Ngawi	3,57	4,41	4,70	4,23	A-
143	Kabupaten Bintan	4,40	4,35	3,92	4,22	A-
144	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4,59	3,32	4,75	4,22	A-

145	Kabupaten Bojonegoro	3,83	4,04	4,77	4,21	A-
146	Kabupaten Kayong Utara	4,43	3,90	4,31	4,21	A-
147	Kabupaten Nias Utara	4,20	4,13	4,31	4,21	A-
148	Kabupaten Bone Bolango	4,57	3,53	4,52	4,21	A-
149	Kabupaten Probolinggo	4,65	4,29	3,67	4,20	A-
150	Kabupaten Bulungan	4,17	4,24	4,20	4,20	A-
151	Kabupaten Konawe	3,91	4,17	4,53	4,20	A-
152	Kabupaten Kepulauan Anambas	4,57	3,98	4,03	4,19	A-
153	Kabupaten Bantul	4,09	4,36	4,10	4,18	A-
154	Kabupaten Kubu Raya	4,63	3,57	4,34	4,18	A-
155	Kabupaten Bireuen	4,12	4,30	4,11	4,18	A-
156	Kabupaten Rokan Hulu	4,15	4,23	4,15	4,18	A-
157	Kabupaten Boalemo	4,57	3,61	4,34	4,17	A-
158	Kabupaten Tangerang	3,93	4,37	4,21	4,17	A-
159	Kabupaten Klungkung	4,22	3,77	4,48	4,16	A-
160	Kabupaten Pandeglang	4,20	4,11	4,16	4,16	A-
161	Kabupaten Cianjur	3,94	4,07	4,46	4,16	A-
162	Kabupaten Gresik	4,14	4,03	4,30	4,16	A-
163	Kabupaten Serang	4,10	4,16	4,20	4,15	A-
164	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4,25	3,86	4,32	4,14	A-

165	Kabupaten Siak	4,31	3,84	4,26	4,14	A-
166	Kabupaten Klaten	4,08	4,18	4,14	4,13	A-
167	Kabupaten Pasaman	4,54	3,68	4,16	4,13	A-
168	Kabupaten Blitar	3,84	4,26	4,27	4,12	A-
169	Kabupaten Bangka	4,33	3,92	4,09	4,11	A-
170	Kabupaten Bangka Tengah	4,14	4,02	4,18	4,11	A-
171	Kabupaten Simalungun	3,99	4,39	3,96	4,11	A-
172	Kabupaten Kutai Barat	4,24	3,90	4,19	4,11	A-
173	Kabupaten Padang Lawas Utara	4,48	3,70	4,15	4,11	A-
174	Kabupaten Padang Lawas	3,88	4,35	4,08	4,10	A-
175	Kabupaten Tabanan	4,17	3,81	4,32	4,10	A-
176	Kabupaten Kampar	3,68	4,13	4,48	4,10	A-
177	Kabupaten Pohnpei	4,18	4,02	4,09	4,10	A-
178	Kabupaten Sumbawa Barat	N/A	4,12	4,06	4,09	A-
179	Kabupaten Sanggau	4,08	4,07	4,11	4,09	A-
180	Kabupaten Aceh Tenggara	4,22	4,00	4,04	4,09	A-
181	Kabupaten Mesuji	4,10	4,06	4,09	4,08	A-
182	Kabupaten Empat Lawang	3,76	3,80	4,66	4,07	A-
183	Kabupaten Nias	4,32	3,45	4,45	4,07	A-
184	Kabupaten Gianyar	3,70	3,98	4,52	4,07	A-
185	Kabupaten Pidie Jaya	4,52	4,23	3,42	4,06	A-
186	Kabupaten Lebak	3,93	4,10	4,13	4,05	A-

187	Kabupaten Landak	4,31	3,36	4,47	4,05	A-
188	Kabupaten Malang	3,76	4,29	4,09	4,05	A-
189	Kabupaten Paser	3,72	3,80	4,56	4,03	A-
190	Kabupaten Belitung	3,97	4,11	3,97	4,02	A-
191	Kabupaten Tojo Unauna	3,94	4,09	4,01	4,01	A-
192	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,53	4,28	3,22	4,01	A-
193	Kabupaten Belitung Timur	4,02	3,92	4,09	4,01	A-
194	Kabupaten Indragiri Hulu	3,96	4,49	3,55	4,00	B
195	Kabupaten Buleleng	4,00	3,90	4,08	3,99	B
196	Kabupaten Soppeng	3,97	3,72	4,29	3,99	B
197	Kabupaten Bener Meriah	4,31	3,76	3,90	3,99	B
198	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	4,24	4,27	3,46	3,99	B
199	Kabupaten Lampung Timur	4,29	3,72	3,96	3,99	B
200	Kabupaten Trenggalek	4,07	4,11	3,70	3,96	B
201	Kabupaten Mempawah	4,34	3,17	4,36	3,96	B
202	Kabupaten Aceh Tengah	4,55	3,79	3,51	3,95	B
203	Kabupaten Pinrang	4,14	3,86	3,85	3,95	B
204	Kabupaten Bengkulu Selatan	4,02	3,87	3,93	3,94	B
205	Kabupaten Pamekasan	4,17	3,89	3,76	3,94	B

206	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	4,05	3,82	3,91	3,93	B
207	Kabupaten Polewali Mandar	3,68	3,51	4,58	3,92	B
208	Kabupaten Aceh Barat	4,55	3,56	3,65	3,92	B
209	Kabupaten Bangka Selatan	3,82	3,80	4,14	3,92	B
210	Kabupaten Lampung Barat	3,83	3,78	4,10	3,90	B
211	Kabupaten Morowali Utara	4,18	3,89	3,62	3,90	B
212	Kabupaten Kotawaringin Barat	4,02	3,81	3,85	3,89	B
213	Kabupaten Lahat	3,79	3,28	4,61	3,89	B
214	Kabupaten Lampung Selatan	4,22	3,39	4,06	3,89	B
215	Kabupaten Sragen	4,02	3,61	4,01	3,88	B
216	Kabupaten Labuhan Batu	3,33	3,94	4,36	3,88	B
217	Kabupaten Bondowoso	3,76	4,27	3,55	3,86	B
218	Kabupaten Kepahiang	4,00	3,50	4,04	3,85	B
219	Kabupaten Solok Selatan	3,77	3,52	4,22	3,84	B
220	Kabupaten Dairi	4,38	3,40	3,70	3,83	B
221	Kabupaten Lingga	4,19	3,29	4,00	3,83	B
222	Kabupaten Kaur	3,88	3,44	4,15	3,82	B
223	Kabupaten Manggarai Timur	3,43	4,18	3,84	3,82	B
224	Kabupaten Toba	3,85	3,71	3,88	3,81	B

225	Kabupaten Tana Tidung	3,93	3,44	4,06	3,81	B
226	Kabupaten Magelang	3,57	3,81	4,04	3,81	B
227	Kabupaten Simeulue	4,06	3,08	4,28	3,81	B
228	Kabupaten Tanah Bumbu	4,15	3,34	3,89	3,79	B
229	Kabupaten Aceh Jaya	4,01	3,51	3,86	3,79	B
230	Kabupaten Gayo Lues	3,98	3,62	3,75	3,78	B
231	Kabupaten Manggarai	3,80	3,66	3,88	3,78	B
232	Kabupaten Mukomuko	3,77	3,73	3,83	3,78	B
233	Kabupaten Karangasem	3,92	3,47	3,89	3,76	B
234	Kabupaten Nagan Raya	3,71	3,96	3,61	3,76	B
235	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	4,11	3,31	3,83	3,75	B
236	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,66	3,68	3,90	3,75	B
237	Kabupaten Lombok Tengah	3,92	3,25	4,05	3,74	B
238	Kabupaten Nunukan	3,57	3,74	3,90	3,74	B
239	Kabupaten Aceh Utara	3,84	3,73	3,60	3,72	B
240	Kabupaten Lombok Barat	4,13	3,03	3,99	3,72	B
241	Kabupaten Bantaeng	3,85	2,84	4,46	3,72	B
242	Kabupaten Berau	3,03	4,47	3,64	3,71	B
243	Kabupaten Manggarai Barat	3,80	3,49	3,85	3,71	B

244	Kabupaten Bangka Barat	3,48	3,70	3,93	3,70	B
245	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,84	3,15	4,08	3,69	B
246	Kabupaten Bone	3,35	3,81	3,91	3,69	B
247	Kabupaten Hulu Sungai Utara	4,42	3,34	3,31	3,69	B
248	Kabupaten Pidie	3,81	3,39	3,85	3,68	B
249	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,63	3,23	4,16	3,67	B
250	Kabupaten Samosir	3,81	3,66	3,53	3,67	B
251	Kabupaten Pesisir Barat	4,08	3,95	2,96	3,66	B
252	Kabupaten Kerinci	3,59	3,73	N/A	3,66	B
253	Kabupaten Gorontalo Utara	4,08	3,22	3,66	3,65	B
254	Kabupaten Lebong	3,65	3,49	3,82	3,65	B
255	Kabupaten Jembrana	3,15	3,82	3,98	3,65	B
256	Kabupaten Bengkulu Utara	3,16	4,45	3,33	3,65	B
257	Kabupaten Karo	3,98	3,95	2,96	3,63	B
258	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,74	3,47	4,67	3,63	B
259	Kabupaten Aceh Selatan	3,83	3,06	3,98	3,62	B
260	Kabupaten Morowali	3,92	3,26	3,69	3,62	B
261	Kabupaten Bima	3,64	3,84	3,37	3,62	B
262	Kabupaten Raja Ampat	3,34	3,74	3,77	3,62	B
263	Kabupaten Jeneponto	3,66	2,93	4,25	3,61	B

264	Kabupaten Lombok Timur	3,93	3,08	3,82	3,61	B
265	Kabupaten Sintang	3,94	3,35	3,53	3,61	B
266	Kabupaten Katingan	4,22	2,88	3,70	3,60	B
267	Kabupaten Dompu	4,23	3,33	3,22	3,59	B
268	Kabupaten Aceh Besar	3,56	4,01	3,16	3,58	B
269	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,80	3,30	3,63	3,58	B
270	Kabupaten Seluma	4,55	2,91	3,19	3,55	B
271	Kabupaten Pakpak Bharat	3,97	2,98	3,70	3,55	B
272	Kabupaten Gowa	3,78	3,22	3,64	3,55	B
273	Kabupaten Sigi	3,52	3,25	3,85	3,54	B
274	Kabupaten Pasaman Barat	3,77	3,57	3,16	3,50	B-
275	Kabupaten Poso	N/A	3,25	3,75	3,50	B-
276	Kabupaten Bangli	3,39	3,72	3,37	3,49	B-
277	Kabupaten Gorontalo	3,51	2,83	4,11	3,48	B-
278	Kabupaten Konawe Selatan	3,75	3,09	3,61	3,48	B-
279	Kabupaten Barru	4,14	2,92	3,38	3,48	B-
280	Kabupaten Ende	3,93	2,80	3,69	3,47	B
281	Kabupaten Banggai Laut	3,96	2,98	3,48	3,47	B-
282	Kabupaten Tapanuli Utara	3,40	3,08	3,92	3,47	B-
283	Kabupaten Labuhanbatu Utara	4,02	2,60	3,71	3,44	B-

284	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	3,93	2,99	3,35	3,42	B-
285	Kabupaten Tulang Bawang Barat	4,29	2,89	3,09	3,42	B-
286	Kabupaten Sumenep	4,12	2,64	3,50	3,42	B-
287	Kabupaten Kapuas	3,67	2,71	3,87	3,42	B-
288	Kabupaten Sinjai	3,04	3,09	4,11	3,41	B-
289	Kabupaten Kolaka	3,76	3,43	3,04	3,41	B-
290	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3,55	3,13	3,53	3,40	B-
291	Kabupaten Aceh Timur	3,35	3,28	3,54	3,39	B-
292	Kabupaten Buton Utara	2,92	3,67	3,53	3,37	B-
293	Kabupaten Bulukumba	3,22	3,67	3,19	3,36	B-
294	Kabupaten Muna	3,75	3,27	3,03	3,35	B-
295	Kabupaten Buton	3,38	3,30	N/A	3,34	B-
296	Kabupaten Lembata	2,91	3,13	3,94	3,33	B-
297	Kabupaten Pulang Pisau	3,77	2,76	3,45	3,33	B-
298	Kabupaten Bombana	3,60	3,25	3,12	3,32	B-
299	Kabupaten Situbondo	3,51	3,08	3,35	3,31	B-
300	Kabupaten Rokan Hilir	3,43	3,24	3,20	3,29	B-
301	Kabupaten Banggai	3,12	3,02	3,71	3,28	B-
302	Kabupaten Merangin	3,47	2,92	3,45	3,28	B-
303	Kabupaten Kolaka Timur	3,62	3,21	3,01	3,28	B-

304	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,36	3,11	3,33	3,27	B-
305	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,90	3,41	3,49	3,27	B-
306	Kabupaten Sumba Timur	3,85	2,67	3,28	3,27	B-
307	Kabupaten Agam	2,66	3,26	3,82	3,25	B-
308	Kabupaten Muaro Jambi	3,57	3,28	2,84	3,23	B-
309	Kabupaten Wakatobi	3,04	3,27	3,37	3,23	B-
310	Kabupaten Bengkayang	2,70	3,11	3,85	3,22	B-
311	Kabupaten Dharmasraya	3,03	4,20	2,41	3,21	B-
312	Kabupaten Sekadau	3,12	3,48	3,02	3,21	B-
313	Kabupaten Pelalawan	3,25	2,89	3,46	3,20	B-
314	Kabupaten Halmahera Utara	2,95	3,29	3,35	3,20	B-
315	Kabupaten Malinau	3,22	3,27	3,07	3,19	B-
316	Kabupaten Konawe Utara	3,18	3,08	3,29	3,18	B-
317	Kabupaten Asahan	4,16	2,90	2,46	3,17	B-
318	Kabupaten Kepulauan Meranti	3,76	2,71	3,05	3,17	B-
319	Kabupaten Parigi Moutong	3,23	3,10	3,19	3,17	B-
320	Kabupaten Murung Raya	3,53	3,05	2,83	3,14	B-
321	Kabupaten Nias Selatan	3,88	3,60	1,91	3,13	B-
322	Kabupaten Tana Toraja	3,05	3,41	2,91	3,12	B-

323	Kabupaten Sumbawa	3,17	3,05	3,13	3,12	B-
324	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,52	2,96	2,86	3,11	B-
325	Kabupaten Barito Utara	3,76	1,55	3,98	3,10	B-
326	Kabupaten Kapuas Hulu	3,08	3,08	N/A	3,08	B-
327	Kabupaten Banggai Kepulauan	3,14	3,00	3,10	3,08	B-
328	Kabupaten Tolitoli	3,95	2,48	2,80	3,08	B-
329	Kabupaten Rejang Lebong	2,88	3,47	2,87	3,07	B
330	Kabupaten Nias Barat	3,18	3,21	2,82	3,07	B-
331	Kabupaten Majene	2,75	3,13	3,23	3,04	B-
332	Kabupaten Lamandau	3,72	2,25	3,11	3,03	B-
333	Kabupaten Buol	3,83	3,66	1,56	3,02	B-
334	Kabupaten Sukamara	3,13	2,83	3,08	3,01	B-
335	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3,17	2,91	2,93	3,00	B-
336	Kabupaten Sarolangun	3,48	2,47	3,01	2,99	C
337	Kabupaten Lombok Utara	4,06	2,79	2,11	2,99	C
338	Kabupaten Bungo	3,16	2,79	2,95	2,97	C
339	Kabupaten Bandung Barat	2,50	3,13	3,26	2,96	C
340	Kabupaten Batu Bara	2,79	2,55	3,54	2,96	C
341	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,41	3,51	1,95	2,96	C

342	Kabupaten Biak Numfor	2,86	2,94	3,05	2,95	C
343	Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A	N/A		N/A
344	Kabupaten Halmahera Timur	3,05	2,52	3,19	2,92	C
345	Kabupaten Kutai Timur	3,52	1,89	3,30	2,90	C
346	Kabupaten Takalar	3,51	1,89	3,22	2,87	C
347	Kabupaten Mamuju	2,95	1,73	3,93	2,87	C
348	Kabupaten Maluku Barat Daya	3,40	2,61	2,58	2,86	C
349	Kabupaten Mandailing Natal	3,16	2,79	2,44	2,80	C
350	Kabupaten Seruyan	4,08	2,09	2,19	2,79	C
351	Kabupaten Buton Tengah	2,46	2,90	2,94	2,77	C
352	Kabupaten Tanimbar	2,97	2,94	2,36	2,76	C
353	Kabupaten Muna Barat	2,73	2,59	2,93	2,75	C
354	Kabupaten Sabu Raijua	1,93	2,97	3,35	2,75	C
355	Kabupaten Kolaka Utara	3,37	1,61	3,25	2,74	C
356	Kabupaten Mamuju Tengah	3,18	1,64	3,38	2,73	C
357	Kabupaten Melawi	2,40	2,45	3,29	2,71	C
358	Kabupaten Mappi	3,86	2,40	1,83	2,70	C
359	Kabupaten Wajo	2,89	2,28	2,92	2,70	C
360	Kabupaten Merauke	2,74	2,86	2,48	2,69	C
361	Kabupaten Kepulauan Talaud	2,17	3,21	-	2,69	C

362	Kabupaten Kepulauan Sula	N/A	N/A	N/A		N/A
363	Kabupaten Teluk Wondama	2,62	2,70	2,69	2,67	C
364	Kabupaten Buton Selatan	2,22	2,90	2,85	2,66	C
365	Kabupaten Pasangkayu	2,47	1,91	3,49	2,62	C
366	Kabupaten Barito Selatan	2,92	1,97	2,94	2,61	C
367	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3,88	2,52	1,40	2,60	C
368	Kabupaten Kaimana	3,07	2,09	2,62	2,59	C
369	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,56	3,00	2,19	2,58	C
370	Kabupaten Rote Ndao	2,66	2,45	2,61	2,57	C
371	Kabupaten Manokwari	3,08	2,39	2,24	2,57	C
372	Kabupaten Gunung Mas	N/A	N/A	N/A		N/A
373	Kabupaten Kotabaru	2,82	2,26	2,56	2,55	C
374	Kabupaten Maros	2,99	2,29	2,35	2,54	C
375	Kabupaten Tapanuli Selatan	3,42	1,66	2,54	2,54	C
376	Kabupaten Tebo	3,24	1,39	2,98	2,54	C
377	Kabupaten Buru Selatan	2,91	2,19	2,38	2,49	C-
378	Kabupaten Minahasa	2,63	2,61	2,22	2,49	C-
379	Kabupaten Sorong	2,65	2,27	2,54	2,49	C-
380	Kabupaten Jayawijaya	N/A	N/A	N/A		N/A

381	Kabupaten Sumba Barat Daya	N/A	N/A	N/A		N/A
382	Kabupaten Batanghari	1,66	1,90	3,76	2,44	C-
383	Kabupaten Donggala	1,48	2,85	2,97	2,43	C-
384	Kabupaten Toraja Utara	3,41	1,50	2,39	2,43	C-
385	Kabupaten Luwu	2,00	2,00	3,19	2,40	C-
386	Kabupaten Flores Timur	2,12	2,66	N/A	2,39	C-
387	Kabupaten Mamasa	1,93	2,34	2,89	2,39	C-
388	Kabupaten Luwu Utara	3,53	1,76	1,85	2,38	C-
389	Kabupaten Pulau Taliabu	3,03	2,10	1,98	2,37	C-
390	Kabupaten Kepulauan Aru	2,04	2,19	2,83	2,35	C-
391	Kabupaten Kupang	2,55	1,82	2,55	2,31	C-
392	Kabupaten Jayapura	3,08	1,14	2,64	2,29	C-
393	Kabupaten Sikka	2,77	1,48	2,60	2,28	C-
394	Kabupaten Barito Timur	2,24	N/A	2,31	2,28	C-
395	Kabupaten sumba barat Daya	N/A	N/A	N/A		N/A
396	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,75	2,02	2,01	2,26	C-
397	Kabupaten Halmahera Tengah	2,77	1,91	2,08	2,25	C-
398	Kabupaten Halmahera Selatan	3,06	1,28	2,36	2,23	C-
399	Kabupaten Maluku Tenggara	2,08	2,25	2,32	2,22	C-

400	Kabupaten Alor	2,09	1,97	2,57	2,21	C-
401	Kabupaten Nabire	N/A	N/A	N/A		N/A
402	Kabupaten Asmat	2,00	1,72	2,45	2,06	C-
403	Kabupaten Yapen	2,95	N/A	1,00	1,98	D
404	Kabupaten Halmahera Barat	1,66	1,71	2,51	1,96	D
405	Kabupaten Seram Bagian Timur	1,17	N/A	2,74	1,96	D
406	Kabupaten Ngada	2,12	1,67	1,89	1,89	D
407	Kabupaten Yahukimo	1,56	1,96	2,12	1,88	D
408	Kabupaten Belu	1,04	1,01	3,48	1,84	D
409	Kabupaten Buru	2,25	1,00	2,11	1,79	D
410	Kabupaten Luwu Timur	2,13	1,34	N/A	1,74	D
411	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,37	2,17	1,65	1,73	D
412	Kabupaten Sumba Tengah	1,38	1,87	1,92	1,72	D
413	Kabupaten Enrekang	1,72	1,57	1,72	1,67	D
414	Kabupaten Mahakam Ulu	N/A	1,15	1,68	1,42	E
415	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,96	3,52	3,48	3,32	B-
416	Kabupaten Maluku Tengah	N/A	N/A	N/A		N/A
417	Kabupaten Nagekeo	2,5	N/A	2,02	1,16	E
Rata-rata					3,67	B

2. Persentase Instansi Pemerintah (IP) Memiliki IPP "Baik"

No.	Instansi	Lingkup	IPP	Kategori
1	Kementerian Keuangan	KL	4,91	A
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan	KL	4,91	A
3	Badan Pusat Statistik	KL	4,91	A
4	Kementerian Agama	KL	4,86	A
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	KL	4,80	A
6	Komisi Pemilihan Umum	KL	4,79	A
7	Badan Kepegawaian Negara	KL	4,78	A
8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	KL	4,77	A
9	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI	KL	4,74	A
10	Kementerian Perhubungan	KL	4,74	A
11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	KL	4,72	A
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KL	4,72	A
13	Kementerian Kesehatan	KL	4,70	A
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	KL	4,70	A
15	Lembaga Administrasi Negara	KL	4,69	A
16	Badan Riset dan Inovasi Nasional	KL	4,69	A
17	Kementerian Pertanian	KL	4,69	A
18	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	KL	4,67	A

19	Badan Standarisasi Nasional	KL	4,67	A
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KL	4,67	A
21	TNI	KL	4,67	A
22	Badan Intelijen Negara	KL	4,63	A
23	Mahkamah Konstitusi	KL	4,62	A
24	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KL	4,62	A
25	Kepolisian RI	KL	4,61	A
26	Kementerian Dalam Negeri	KL	4,61	A
27	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	KL	4,60	A
28	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	KL	4,59	A
29	Kementerian Perdagangan	KL	4,59	A
30	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	KL	4,58	A
31	Mahkamah Agung	KL	4,58	A
32	Sekretariat Kabinet	KL	4,58	A
33	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	KL	4,57	A
34	Badan Siber dan Sandi Negara	KL	4,55	A
35	Kementerian Luar Negeri	KL	4,53	A
36	Kementerian Pertahanan	KL	4,53	A
37	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	KL	4,52	A

38	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	KL	4,52	A
39	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	KL	4,52	A
40	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	KL	4,52	A
41	Badan Narkotika Nasional	KL	4,51	A
42	Badan Informasi Geospasial	KL	4,51	A
43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	KL	4,51	A
44	Kementerian Ketenagakerjaan	KL	4,51	A
45	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	KL	4,51	A
46	Kementerian Perindustrian	KL	4,51	A
47	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	KL	4,48	A-
48	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KL	4,48	A-
49	Kementerian Sosial	KL	4,46	A-
50	Komisi Pemberantasan Korupsi	KL	4,43	A-
51	Kejaksaan Agung	KL	4,43	A-
52	Kementerian Sekretariat Negara	KL	4,43	A-
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	KL	4,41	A-
54	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	KL	4,35	A-

55	Badan Keamanan Laut	KL	4,35	A-
56	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KL	4,33	A-
57	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	KL	4,32	A-
58	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KL	4,32	A-
59	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KL	4,31	A-
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	KL	4,29	A-
61	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KL	4,28	A-
62	Perpustakaan Nasional	KL	4,28	A-
63	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	KL	4,26	A-
64	Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi	KL	4,23	A-
65	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	KL	4,22	A-
66	Arsip Nasional Republik Indonesia	KL	4,21	A-
67	Ombudsman RI	KL	4,16	A-
68	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	KL	4,16	A-
69	Dewan Ketahanan Nasional	KL	4,14	A-
70	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	KL	4,09	A-

71	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	KL	4,01	A-
72	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KL	3,94	B
73	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	KL	3,93	B
74	Lembaga Ketahanan Nasional	KL	3,87	B
75	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	KL	3,60	B
76	Komisi Yudisial	KL	3,56	B
77	Badan Pengusahaan Batam	KL	3,56	B
78	Kementerian PPN / Bappenas	KL	3,44	B-
79	Badan Pemeriksa Keuangan	KL	3,30	B-
80	Televisi Republik Indonesia	KL	3,25	B-
81	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Provinsi	4,76	A
82	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	4,63	A
83	Pemerintah Provinsi D,I, Yogyakarta	Provinsi	4,62	A
84	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	4,60	A
85	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	4,56	A
86	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	4,53	A

87	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	4,53	A
88	Pemerintah Provinsi Aceh	Provinsi	4,45	A-
89	Pemerintah Provinsi NTB	Provinsi	4,42	A-
90	Pemerintah Provinsi Bali	Provinsi	4,40	A-
91	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi	4,34	A-
92	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi	4,26	A-
93	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	4,26	A-
94	Pemerintah Provinsi Kep, Bangka Belitung	Provinsi	4,23	A-
95	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	4,22	A-
96	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	4,20	A-
97	Pemerintah Provinsi Lampung	Provinsi	4,27	A-
98	Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi	4,12	A-
99	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	4,12	A-
100	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Provinsi	4,04	A-
101	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Provinsi	3,94	B
102	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	3,90	B
103	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	3,75	B
104	Pemerintah Provinsi Banten	Provinsi	3,73	B
105	Pemerintah Provinsi Jambi	Provinsi	3,68	B

106	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	3,64	B
107	Pemerintah Provinsi NTT	Provinsi	3,56	B
108	Pemerintah Provinsi Papua Barat*	Provinsi	3,32	B-
109	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	3,32	B-
110	Kabupaten Cilacap	Kab	4,65	A
111	Kabupaten Sidoarjo	Kab	4,65	A
112	Kabupaten Sleman	Kab	4,63	A
113	Kabupaten Jember	Kab	4,62	A
114	Kabupaten Banyumas	Kab	4,61	A
115	Kabupaten Kudus	Kab	4,61	A
116	Kabupaten Sampang	Kab	4,60	A
117	Kabupaten Madiun	Kab	4,60	A
118	Kabupaten Jombang	Kab	4,60	A
119	Kabupaten Sukoharjo	Kab	4,60	A
120	Kabupaten Banyuwangi	Kab	4,59	A
121	Kabupaten Kebumen	Kab	4,59	A
122	Kabupaten Sumedang	Kab	4,58	A
123	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kab	4,58	A
124	Kabupaten Purwakarta	Kab	4,58	A
125	Kabupaten Wonogiri	Kab	4,58	A
126	Kabupaten Jepara	Kab	4,57	A
127	Kabupaten Nganjuk	Kab	4,57	A
128	Kabupaten Magetan	Kab	4,57	A
129	Kabupaten Musi Banyuasin	Kab	4,57	A

130	Kabupaten Banjarnegara	Kab	4,56	A
131	Kabupaten Garut	Kab	4,56	A
132	Kabupaten Muara Enim	Kab	4,56	A
133	Kabupaten Kulonprogo	Kab	4,55	A
134	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kab	4,55	A
135	Kabupaten Kediri	Kab	4,55	A
136	Kabupaten Pematang	Kab	4,54	A
137	Kabupaten Tapin	Kab	4,54	A
138	Kabupaten Minahasa Selatan	Kab	4,54	A
139	Kabupaten Subang	Kab	4,53	A
140	Kabupaten Deli Serdang	Kab	4,53	A
141	Kabupaten Kuantan Singingi	Kab	4,53	A
142	Kabupaten Wonosobo	Kab	4,52	A
143	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kab	4,52	A
144	Kabupaten Pasuruan	Kab	4,52	A
145	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kab	4,51	A
146	Kabupaten Boyolali	Kab	4,51	A
147	Kabupaten Musi Rawas	Kab	4,51	A
148	Kabupaten Semarang	Kab	4,50	A-
149	Kabupaten Tulang Bawang	Kab	4,50	A-
150	Kabupaten Banjar	Kab	4,49	A-
151	Kabupaten Tabalong	Kab	4,49	A-
152	Kabupaten Badung	Kab	4,49	A-
153	Kabupaten Sukabumi	Kab	4,49	A-

154	Kabupaten Demak	Kab	4,47	A-
155	Kabupaten Rembang	Kab	4,47	A-
156	Kabupaten Serdang Bedagai	Kab	4,47	A-
157	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kab	4,46	A-
158	Kabupaten Lampung Tengah	Kab	4,46	A-
159	Kabupaten Pesisir Selatan	Kab	4,46	A-
160	Kabupaten Natuna	Kab	4,46	A-
161	Kabupaten Solok	Kab	4,46	A-
162	Kabupaten Pringsewu	Kab	4,46	A-
163	Kabupaten Banyuasin	Kab	4,46	A-
164	Kabupaten Tuban	Kab	4,45	A-
165	Kabupaten Pangandaran	Kab	4,44	A-
166	Kabupaten Purbalingga	Kab	4,44	A-
167	Kabupaten Kendal	Kab	4,44	A-
168	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kab	4,44	A-
169	Kabupaten Karanganyar	Kab	4,43	A-
170	Kabupaten Lampung Utara	Kab	4,42	A-
171	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kab	3,49	A-
172	Kabupaten Blora	Kab	4,42	A-
173	Kabupaten Grobogan	Kab	4,41	A-
174	Kabupaten Indramayu	Kab	4,40	A-
175	Kabupaten Ogan Ilir	Kab	4,40	A-
176	Kabupaten Bengkalis	Kab	4,39	A-
177	Kabupaten Tasikmalaya	Kab	4,38	A-

178	Kabupaten Lamongan	Kab	4,38	A-
179	Kabupaten Way Kanan	Kab	4,37	A-
180	Kabupaten Karimun	Kab	4,37	A-
181	Kabupaten Kuningan	Kab	4,37	A-
182	Kabupaten Batang	Kab	4,37	A-
183	Kabupaten Sijunjung	Kab	4,36	A-
184	Kabupaten Bekasi	Kab	4,36	A-
185	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab	4,35	A-
186	Kabupaten Bogor	Kab	4,35	A-
187	Kabupaten Tegal	Kab	4,35	A-
188	Kabupaten Bandung	Kab	4,34	A-
189	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kab	4,34	A-
190	Kabupaten Langkat	Kab	4,34	A-
191	Kabupaten Brebes	Kab	4,33	A-
192	Kabupaten Lumajang	Kab	4,33	A-
193	Kabupaten Ketapang	Kab	4,33	A-
194	Kabupaten Purworejo	Kab	4,33	A-
195	Kabupaten Majalengka	Kab	4,32	A-
196	Kabupaten Indragiri Hilir	Kab	4,32	A-
197	Kabupaten Pesawaran	Kab	4,32	A-
198	Kabupaten Ponorogo	Kab	4,32	A-
199	Kabupaten Minahasa Utara	Kab	4,31	A-
200	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kab	4,30	A-
201	Kabupaten Mojokerto	Kab	4,30	A-
202	Kabupaten Pacitan	Kab	4,30	A-

203	Kabupaten Temanggung	Kab	4,29	A-
204	Kabupaten Ciamis	Kab	4,29	A-
205	Kabupaten Aceh Tamiang	Kab	4,29	A-
206	Kabupaten Padang Pariaman	Kab	4,29	A-
207	Kabupaten Pekalongan	Kab	4,29	A-
208	Kabupaten Tulungagung	Kab	4,29	A-
209	Kabupaten Balangan	Kab	4,29	A-
210	Kabupaten Barito Kuala	Kab	4,28	A-
211	Kabupaten Tanggamus	Kab	4,27	A-
212	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab	4,27	A-
213	Kabupaten Gunung Kidul	Kab	4,27	A-
214	Kabupaten Tanah Datar	Kab	4,26	A-
215	Kabupaten Bangkalan	Kab	4,26	A-
216	Kabupaten Karawang	Kab	4,26	A-
217	Kabupaten Sambas	Kab	4,26	A-
218	Kabupaten Aceh Singkil	Kab	4,25	A-
219	Kabupaten Cirebon	Kab	4,24	A-
220	Kabupaten Pati	Kab	4,24	A-
221	Kabupaten Tanah Laut	Kab	4,23	A-
222	Kabupaten Ngawi	Kab	4,23	A-
223	Kabupaten Bintan	Kab	4,22	A-
224	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kab	4,22	A-
225	Kabupaten Bojonegoro	Kab	4,21	A-
226	Kabupaten Kayong Utara	Kab	4,21	A-
227	Kabupaten Nias Utara	Kab	4,21	A-

228	Kabupaten Bone Bolango	Kab	4,21	A-
229	Kabupaten Probolinggo	Kab	4,20	A-
230	Kabupaten Bulungan	Kab	4,20	A-
231	Kabupaten Konawe	Kab	4,20	A-
232	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kab	4,19	A-
233	Kabupaten Bantul	Kab	4,18	A-
234	Kabupaten Kubu Raya	Kab	4,18	A-
235	Kabupaten Bireuen	Kab	4,18	A-
236	Kabupaten Rokan Hulu	Kab	4,18	A-
237	Kabupaten Boalemo	Kab	4,17	A-
238	Kabupaten Tangerang	Kab	4,17	A-
239	Kabupaten Klungkung	Kab	4,16	A-
240	Kabupaten Pandeglang	Kab	4,16	A-
241	Kabupaten Cianjur	Kab	4,16	A-
242	Kabupaten Gresik	Kab	4,16	A-
243	Kabupaten Serang	Kab	4,15	A-
244	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kab	4,14	A-
245	Kabupaten Siak	Kab	4,14	A-
246	Kabupaten Klaten	Kab	4,13	A-
247	Kabupaten Pasaman	Kab	4,13	A-
248	Kabupaten Blitar	Kab	4,12	A-
249	Kabupaten Bangka	Kab	4,11	A-
250	Kabupaten Bangka Tengah	Kab	4,11	A-
251	Kabupaten Simalungun	Kab	4,11	A-
252	Kabupaten Kutai Barat	Kab	4,11	A-

253	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kab	4,11	A-
254	Kabupaten Padang Lawas	Kab	4,10	A-
255	Kabupaten Tabanan	Kab	4,10	A-
256	Kabupaten Kampar	Kab	4,10	A-
257	Kabupaten Puhwato	Kab	4,10	A-
258	Kabupaten Sumbawa Barat	Kab	4,09	A-
259	Kabupaten Sanggau	Kab	4,09	A-
260	Kabupaten Aceh Tenggara	Kab	4,09	A-
261	Kabupaten Mesuji	Kab	4,08	A-
262	Kabupaten Empat Lawang	Kab	4,07	A-
263	Kabupaten Nias	Kab	4,07	A-
264	Kabupaten Gianyar	Kab	4,07	A-
265	Kabupaten Pidie Jaya	Kab	4,06	A-
266	Kabupaten Lebak	Kab	4,05	A-
267	Kabupaten Landak	Kab	4,05	A-
268	Kabupaten Malang	Kab	4,05	A-
269	Kabupaten Paser	Kab	4,03	A-
270	Kabupaten Belitung	Kab	4,02	A-
271	Kabupaten Tojo Unauna	Kab	4,01	A-
272	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kab	4,01	A-
273	Kabupaten Belitung Timur	Kab	4,01	A-
274	Kabupaten Indragiri Hulu	Kab	4,00	B
275	Kabupaten Buleleng	Kab	3,99	B
276	Kabupaten Soppeng	Kab	3,99	B
277	Kabupaten Bener Meriah	Kab	3,99	B

278	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	Kab	3,99	B
279	Kabupaten Lampung Timur	Kab	3,99	B
280	Kabupaten Trenggalek	Kab	3,96	B
281	Kabupaten Mempawah	Kab	3,96	B
282	Kabupaten Aceh Tengah	Kab	3,95	B
283	Kabupaten Pinrang	Kab	3,95	B
284	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kab	3,94	B
285	Kabupaten Pamekasan	Kab	3,94	B
286	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kab	3,93	B
287	Kabupaten Polewali Mandar	Kab	3,92	B
288	Kabupaten Aceh Barat	Kab	3,92	B
289	Kabupaten Bangka Selatan	Kab	3,92	B
290	Kabupaten Lampung Barat	Kab	3,90	B
291	Kabupaten Morowali Utara	Kab	3,90	B
292	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kab	3,89	B
293	Kabupaten Lahat	Kab	3,89	B
294	Kabupaten Lampung Selatan	Kab	3,89	B
295	Kabupaten Sragen	Kab	3,88	B
296	Kabupaten Labuhan Batu	Kab	3,88	B
297	Kabupaten Bondowoso	Kab	3,86	B
298	Kabupaten Kepahiang	Kab	3,85	B
299	Kabupaten Solok Selatan	Kab	3,84	B
300	Kabupaten Dairi	Kab	3,83	B

301	Kabupaten Lingga	Kab	3,83	B
302	Kabupaten Kaur	Kab	3,82	B
303	Kabupaten Manggarai Timur	Kab	3,82	B
304	Kabupaten Toba	Kab	3,81	B
305	Kabupaten Tana Tidung	Kab	3,81	B
306	Kabupaten Magelang	Kab	3,81	B
307	Kabupaten Simeulue	Kab	3,81	B
308	Kabupaten Tanah Bumbu	Kab	3,79	B
309	Kabupaten Aceh Jaya	Kab	3,79	B
310	Kabupaten Gayo Lues	Kab	3,78	B
311	Kabupaten Manggarai	Kab	3,78	B
312	Kabupaten Mukomuko	Kab	3,78	B
313	Kabupaten Karangasem	Kab	3,76	B
314	Kabupaten Nagan Raya	Kab	3,76	B
315	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kab	3,75	B
316	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab	3,75	B
317	Kabupaten Lombok Tengah	Kab	3,74	B
318	Kabupaten Nunukan	Kab	3,74	B
319	Kabupaten Aceh Utara	Kab	3,72	B
320	Kabupaten Lombok Barat	Kab	3,72	B
321	Kabupaten Bantaeng	Kab	3,72	B
322	Kabupaten Berau	Kab	3,71	B
323	Kabupaten Manggarai Barat	Kab	3,71	B
324	Kabupaten Bangka Barat	Kab	3,70	B

325	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kab	3,69	B
326	Kabupaten Bone	Kab	3,69	B
327	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kab	3,69	B
328	Kabupaten Pidie	Kab	3,68	B
329	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kab	3,67	B
330	Kabupaten Samosir	Kab	3,67	B
331	Kabupaten Pesisir Barat	Kab	3,66	B
332	Kabupaten Kerinci	Kab	3,66	B
333	Kabupaten Gorontalo Utara	Kab	3,65	B
334	Kabupaten Lebong	Kab	3,65	B
335	Kabupaten Jembrana	Kab	3,65	B
336	Kabupaten Bengkulu Utara	Kab	3,65	B
337	Kabupaten Karo	Kab	3,63	B
338	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kab	3,63	B
339	Kabupaten Aceh Selatan	Kab	3,62	B
340	Kabupaten Morowali	Kab	3,62	B
341	Kabupaten Bima	Kab	3,62	B
342	Kabupaten Raja Ampat	Kab	3,62	B
343	Kabupaten Jeneponto	Kab	3,61	B
344	Kabupaten Lombok Timur	Kab	3,61	B
345	Kabupaten Sintang	Kab	3,61	B
346	Kabupaten Katingan	Kab	3,60	B
347	Kabupaten Dompu	Kab	3,59	B
348	Kabupaten Aceh Besar	Kab	3,58	B

349	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kab	3,58	B
350	Kabupaten Seluma	Kab	3,55	B
351	Kabupaten Pakpak Bharat	Kab	3,55	B
352	Kabupaten Gowa	Kab	3,55	B
353	Kabupaten Sigi	Kab	3,54	B
354	Kabupaten Pasaman Barat	Kab	3,50	B-
355	Kabupaten Poso	Kab	3,50	B-
356	Kabupaten Bangli	Kab	3,49	B-
357	Kabupaten Gorontalo	Kab	3,48	B-
358	Kabupaten Konawe Selatan	Kab	3,48	B-
359	Kabupaten Barru	Kab	3,48	B-
360	Kabupaten Ende	Kab	3,47	B-
361	Kabupaten Banggai Laut	Kab	3,47	B-
362	Kabupaten Tapanuli Utara	Kab	3,47	B-
363	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kab	3,44	B-
364	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kab	3,42	B-
365	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kab	3,42	B-
366	Kabupaten Sumenep	Kab	3,42	B-
367	Kabupaten Kapuas	Kab	3,42	B-
368	Kabupaten Sinjai	Kab	3,41	B-
369	Kabupaten Kolaka	Kab	3,41	B-
370	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab	3,40	B-
371	Kabupaten Aceh Timur	Kab	3,39	B-

372	Kabupaten Buton Utara	Kab	3,37	B-
373	Kabupaten Bulukumba	Kab	3,36	B-
374	Kabupaten Muna	Kab	3,35	B-
375	Kabupaten Buton	Kab	3,34	B-
376	Kabupaten Lembata	Kab	3,33	B-
377	Kabupaten Pulang Pisau	Kab	3,33	B-
378	Kabupaten Bombana	Kab	3,32	B-
379	Kabupaten Situbondo	Kab	3,31	B-
380	Kabupaten Rokan Hilir	Kab	3,29	B-
381	Kabupaten Banggai	Kab	3,28	B-
382	Kabupaten Merangin	Kab	3,28	B-
383	Kabupaten Kolaka Timur	Kab	3,28	B-
384	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kab	3,27	B-
385	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kab	3,27	B-
386	Kabupaten Sumba Timur	Kab	3,27	B-
387	Kabupaten Agam	Kab	3,25	B-
388	Kabupaten Muaro Jambi	Kab	3,23	B-
389	Kabupaten Wakatobi	Kab	3,23	B-
390	Kabupaten Bengkayang	Kab	3,22	B-
391	Kabupaten Dharmasraya	Kab	3,21	B-
392	Kabupaten Sekadau	Kab	3,21	B-
393	Kabupaten Pelalawan	Kab	3,20	B-
394	Kabupaten Halmahera Utara	Kab	3,20	B-
395	Kabupaten Malinau	Kab	3,19	B-
396	Kabupaten Konawe Utara	Kab	3,18	B-

397	Kabupaten Asahan	Kab	3,17	B-
398	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kab	3,17	B-
399	Kabupaten Parigi Moutong	Kab	3,17	B-
400	Kabupaten Murung Raya	Kab	3,14	B-
401	Kabupaten Nias Selatan	Kab	3,13	B-
402	Kabupaten Tana Toraja	Kab	3,12	B-
403	Kabupaten Sumbawa	Kab	3,12	B-
404	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kab	3,11	B-
405	Kabupaten Barito Utara	Kab	3,10	B-
406	Kabupaten Kapuas Hulu	Kab	3,08	B-
407	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kab	3,08	B-
408	Kabupaten Tolitoli	Kab	3,08	B-
409	Kabupaten Rejang Lebong	Kab	3,07	B-
410	Kabupaten Nias Barat	Kab	3,07	B-
411	Kabupaten Majene	Kab	3,04	B-
412	Kabupaten Lamandau	Kab	3,03	B-
413	Kabupaten Buol	Kab	3,02	B-
414	Kabupaten Sukamara	Kab	3,01	B-
415	Kabupaten Humbang Hasuduntan	Kab	3,32	B-
416	Kota Surakarta	Kota	4,69	A
417	Kota Bandung	Kota	4,68	A
418	Kota Depok	Kota	4,67	A
419	Kota Madiun	Kota	4,67	A
420	Kota Denpasar	Kota	4,66	A

421	Kota Palembang	Kota	4,66	A
422	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota	4,66	A
423	Kota Bogor	Kota	4,65	A
424	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota	4,65	A
425	Kota Salatiga	Kota	4,62	A
426	Kota Sukabumi	Kota	4,62	A
427	Kota Magelang	Kota	4,61	A
428	Kota Metro	Kota	4,60	A
429	Kota Kotamobagu	Kota	4,59	A
430	Kota Pekalongan	Kota	4,59	A
431	Kota Bekasi	Kota	4,58	A
432	Kota Cimahi	Kota	4,58	A
433	Kota Surabaya	Kota	4,57	A
434	Kota Malang	Kota	4,57	A
435	Kota Banjarmasin	Kota	4,54	A
436	Kota Yogyakarta	Kota	4,53	A
437	Kota Pasuruan	Kota	4,53	A
438	Kota Banjar	Kota	4,52	A
439	Kota Blitar	Kota	4,52	A
440	Kota Medan	Kota	4,51	A
441	Kota Banjarbaru	Kota	4,50	A-
442	Kota Payakumbuh	Kota	4,50	A-
443	Kota Tomohon	Kota	4,50	A-
444	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota	4,49	A-
445	Kota Tegal	Kota	4,49	A-

446	Kota Mataram	Kota	4,48	A-
447	Kota Bitung	Kota	4,47	A-
448	Kota Manado	Kota	4,46	A-
449	Kota Singkawang	Kota	4,46	A-
450	Kota Prabumulih	Kota	4,46	A-
451	Kota Lubuklinggau	Kota	4,44	A-
452	Kota Semarang	Kota	4,43	A-
453	Kota Tanjungpinang	Kota	4,40	A-
454	Kota Gunungsitoli	Kota	4,39	A-
455	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota	4,39	A-
456	Kota Banda Aceh	Kota	4,38	A-
457	Kota Tangerang	Kota	4,35	A-
458	Kota Pontianak	Kota	4,35	A-
459	Kota Bandar Lampung	Kota	4,33	A-
460	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota	4,32	A-
461	Kota Pariaman	Kota	4,32	A-
462	Kota Tasikmalaya	Kota	4,30	A-
463	Kota Bontang	Kota	4,28	A-
464	Kota Samarinda	Kota	4,26	A-
465	Kota Tangerang Selatan	Kota	4,25	A-
466	Kota Pekanbaru	Kota	4,25	A-
467	Kota Cilegon	Kota	4,23	A-
468	Kota Kediri	Kota	4,20	A-
469	Kota Batam	Kota	4,20	A-
470	Kota Mojokerto	Kota	4,19	A-

471	Kota Balikpapan	Kota	4,19	A-
472	Kota Padang Panjang	Kota	4,17	A-
473	Kota Probolinggo	Kota	4,15	A-
474	Kota Tebing Tinggi	Kota	4,15	A-
475	Kota Pangkalpinang	Kota	4,15	A-
476	Kota Kupang	Kota	4,15	A-
477	Kota Bukittinggi	Kota	4,13	A-
478	Kota Tarakan	Kota	4,08	A-
479	Kota Solok	Kota	4,08	A-
480	Kota Binjai	Kota	4,01	A-
481	Kota Ambon	Kota	4,00	B
482	Kota Serang	Kota	3,99	B
483	Kota Pagar Alam	Kota	3,99	B
484	Kota Cirebon	Kota	3,97	B
485	Kota Jambi	Kota	3,96	B
486	Kota Bengkulu	Kota	3,95	B
487	Kota Lhokseumawe	Kota	3,94	B
488	Kota Langsa	Kota	3,86	B
489	Kota Padangsidempuan	Kota	3,86	B
490	Kota Dumai	Kota	3,84	B
491	Kota Subulussalam	Kota	3,82	B
492	Kota Palu	Kota	3,78	B
493	Kota Sabang	Kota	3,77	B
494	Kota Batu	Kota	3,76	B
495	Kota Sibolga	Kota	3,75	B
496	Kota Palangkaraya	Kota	3,71	B
497	Kota Bima	Kota	3,67	B

498	Kota Padang	Kota	3,44	B-
499	Kota Kendari	Kota	3,44	B-
500	Kota Baubau	Kota	3,31	B-
501	Kota Makassar	Kota	3,21	B-
502	Kota Sawahlunto	Kota	3,18	B-
503	Kota Pare-Pare	Kota	3,16	B-
504	Kota Tanjungbalai	Kota	3,14	B-
505	Kota Gorontalo	Kota	3,13	B-